



MAJALAH Parlementaria

EDISI 198 • TH. 2021



PTM
Terbatas

Asa Selamatkan Generasi Bangsa

Di tengah melonjaknya kasus positif Covid-19, DPR RI meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas terutama zona merah.



PENGANTAR REDAKSI

PEMERINTAH berencana akan segera merealisasikan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di tahun ajaran baru pada Juli 2021. Aturan tata cara pelaksanaannya tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memuat panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019*.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah, angka penularan Covid-19 di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Kita tidak boleh begitu saja mengabaikan kesehatan generasi muda dari terpaparnya virus Corona. Untuk itu di edisi **Majalah Parleментарia 198**, Tim Redaksi mengangkat tema 'Ara Selamatkan Generasi Bangsa'.

Dari sudut pandang parlemen, demi keselamatan generasi bangsa, DPR RI menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun.

Kemudian di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi mengupas terkait polemik dana haji yang ditakutkan masyarakat akan digunakan untuk kebutuhan lainnya termasuk salah satunya infrastruktur. Komisi VIII DPR RI menegaskan akan melakukan pengasawan demi menjamin keamanan dana masyarakat yang dikelola BPKH.

Selanjutnya, pada Rubrik Anggaran salah satunya adalah sorotan dari DPR RI terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali *tax amnesty* atau pengampunan pajak akan segera bergulir yang merupakan salah satu bagian RUU KUP. Serta di Rubrik Legislasi, mengulas tentang RUU ASN yang salah satu poinnya DPR RI menginginkan adanya penguatan KASN secara kelembagaan.

Masih banyak lagi yang disajikan **Tim Redaksi Parleментарia** seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

Parleментарia



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



Parleментарia

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretro, S. Ikom,
Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah
Sekretaris Redaksi
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretro, S.I.Kom,
Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal,
S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne
Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandri, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan
Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum
Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R.
Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan,
S.I.P, Eki Baethaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya,
Fahmi Harfa, Saffiri Restu Widyawati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.A.P, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Parlementaria

EDISI 198 • TH. 2021



4	DINAMIKA PARLEMEN	30	PROFIL
	Garuda Indonesia, Masihkah Bisa Terbang Tinggi		Anggia Ermarini : "Gagal jadi Presenter, Malah Pimpin Komisi IV DPR RI"
5	MIMBAR DEMOKRASI	34	KUNKER
	Penuhi Hak Nasabah Jiwasraya Dengan Adil	56	SOROTAN
6	PROLOG		Semangat DPR Pulangkan 7.300 PMIB
	Asa Selamatkan Generasi Bangsa	58	LIPUTAN KHUSUS
	LAPORAN UTAMA		Parlemen Indonesia Tolak Transformasi AIPA
10	Jangan Paksakan PTM	60	DAPIL
12	PTM Perlu Ditinjau Ulang	70	TOKOH
14	Efektifkan Guru Kunjung		Rafi Mascot : "Galeri Bau Tanah Gunakan Area Publik Sebagai Ruang Berekspresi"
15	PPKM Otomatis Anulir PTM	72	PERNIK
16	Target Vaksinasi Guru Molor		Forum Komunikasi Sinergikan DPR dengan Wartawan
18	SUMBANG SARAN	74	KIAT SEHAT
	Simalakama Pembelajaran Tatap Muka		Waspada Bahaya Varian Delta
20	PENGAWASAN	76	WISATA
	Pastikan Keamanan Dana Haji Aman		Indahnya Curug Ciburial Dipinggir Ibukota
	ANGGARAN	78	HOBİ
22	Pengampunan 'Dosa' Pajak Cukup Sekali Seumur Hidup		Azikin Solthan : Usir Jenuh dengan Bernyanyi
24	Pajak Sembako Berpotensi Sakiti Hati Masyarakat 'Kecil'	79	POJOK PARLE
26	LEGISLASI		Menteri Jangan Malas Bales Chat WA
	Revisi UU ASN Perlu Sesuaikan Perkembangan Zaman		
28	FOTO BERITA		

Garuda Indonesia, Masihkah Bisa Terbang Tinggi?

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memukul banyak sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Tak terkecuali bagi maskapai pelat merah seperti Garuda Indonesia. Dalam sejarahnya, maskapai yang didirikan oleh masyarakat Indonesia (Aceh) dengan cara patungan tersebut, kini memiliki utang perseroan yang terus menumpuk hingga Rp 70 triliun, dan terus bertambah

Rp 1 triliun per bulannya.

Berbagai upaya dilakukan agar Garuda 'terbang' kembali. Mulai dari renegotiasi dengan lessor, restrukturisasi utang usaha, hingga rencana rasionalisasi ribuan karyawan dengan cara pensiun dini. Meskipun demikian, jika opsi-opsi tersebut tidak berhasil, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia menegaskan bukan tidak mungkin flag carrier ini akan dipailitkan.

TANGGAPAN KOMISI IV DPR RI



Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI/F-NasDem):

Saya di Fraksi Nasdem menolak dana talangan untuk Garuda. Kami lebih setuju Penyertaan Modal Negara. Karena, pertama, dari sisi finansial juga tidak wajar, debt to equity ratio-nya sudah tinggi kita kasih pinjaman. Kedua, negara juga bukan bank yang bisa kasih pinjaman. Maka, memang Penyertaan Modal Negara yang lebih tepat dengan seluruh konsekuensinya.

Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan):

Penerbangan Garuda yang ke luar negeri, setop semuanya. *Wong* masih Covid-19 kok! *Ngapain sih* Garuda ke luar negeri, ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan itu. Jadi, dari manajemen Garuda sendiri yang harus memikirkan efisiensi. Udah keadaan *collapse* begini, masih ada penerbangan ke luar negeri, lessor masih dibayar.



Herman Khaeron (F-Demokrat):

Saya mendukung aksi korporasi untuk terus melakukan renegotiasi dengan para lessor yang mudah-mudahan nanti ketemu titik tengahnya di mana yang memudahkan dan kemudian memberikan keuntungan bagi Garuda, sewanya bisa diturunkan dan Garuda tetap bisa berjalan.

DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Penuhi Hak Nasabah Jiwasraya dengan Adil

Aspirasi Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya

Forum pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya, Rabu (5/5/2021), mengadukan permasalahan yang dialaminya terkait asuransi Jiwasraya yang dinilai tidak jelas dan tidak adil dalam melakukan klaim pembayaran kepada para nasabah pensiunan BUMN.

Kepada Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel, para pensiunan merasa kecewa karena seolah-olah ditelantarkan, baik oleh Kementerian BUMN atau pun dari Jiwasraya terkait klaim Jiwasraya karena hanya dibayarkan sekitar 22 persen dari jumlah yang selama ini terkumpul

Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menegaskan selaku Pimpinan DPR RI berjanji akan membantu dengan maksimal kepada para pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya yang terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dari Jiwasraya tersebut.

Terakhir, Pimpinan DPR RI mengimbau kepada Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan di Jiwasraya. Sehingga, bisa mendapatkan solusi terbaik bagi para pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya dan juga rakyat Indonesia.



MIMBAR DEMOKRASI menghadirkan aspirasi dari masyarakat yang langsung diserap dan diterima oleh Anggota DPR RI di Rumah Rakyat agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh Anggota DPR RI maupun oleh Pemerintah



Asa Selamatkan Generasi Bangsa

Di tengah melonjaknya kasus positif Covid-19, DPR RI meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas terutama zona merah.



PEMERINTAH berencana akan segera merealisasikan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di tahun ajaran

baru pada Juli 2021. Aturan tata cara pelaksanaannya tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memuat panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019*.

Pro kontra sontak bermunculan. Terlebih saat ini Indonesia sedang dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19. Vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang molor pun menjadi salah satu alasan mencuatnya permintaan penundaan PTM terbatas. *Learning lost* kian menjadi nyata jika sekolah tak kunjung buka. Di samping itu, kita juga tak bisa abai akan kesehatan generasi muda dari terpaparnya virus Corona.

Dari sudut pandang parlemen, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun.

Meskipun direncanakan akan dilaksanakan secara terbatas, ketika nanti diberlakukan, pembelajaran tatap muka pada masa pandemi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus benar-benar memastikan sekolah dan lingkungan sekolah memenuhi

RENCANA AKAN DIMULAI KEMBALI PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH TENTU HARUS DIDUKUNG, TAPI HARUS HATI-HATI, DAN PENUHI SEMUA SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS CORONA

sejumlah syarat yang termaktub dalam SKB 4 Menteri. Di antaranya, sekolah dan lingkungan sekolah harus memiliki sarana dan prasarana protokol kesehatan beserta penunjangnya.

“Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus Corona,” ungkap Puan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia meminta agar PTM Terbatas di Pulau Jawa atau di daerah zona merah penularan Covid-19 dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Tingginya angka penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan kluster baru jika PTM tetap dilaksanakan.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi negara. Pengadaan kuota internet dari APBN sudah tidak ada. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bergerak dalam giat sedekah kuota internet bagi anak-anak yang membutuhkan. Giat ini memang terbayang sebagai ide yang sederhana, namun dengan adanya keterlibatan masyarakat tentu dampaknya akan besar.

Sementara itu, menyikapi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19, serta belum dapat terlaksananya PTM Terbatas, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai metode guru kunjung dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyiasati jika PTM Terbatas tak bisa dilaksanakan.

Menimbang keterbatasan fasilitas di banyak daerah, pembelajaran luring menurutnya akan lebih *feasible*, terutama untuk daerah-daerah 3T, pedesaan, dan wilayah-wilayah dengan kondisi geografis menantang. Metode yang dapat dioptimalkan adalah guru kunjung, dengan pembelajaran berkelompok.

Di sisi lain, DPR RI juga menyoroti molornya target vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Berbagai kendala yang di lapangan menyebabkan target vaksinasi awalnya Juli 2021 mundur menjadi Agustus 2021, padahal tahun ajaran baru seyogyanya dimulai pada bulan Juli.

Hingga pertengahan Juni 2021, angka vaksinasi Covid-19 yang terhadap guru dan tenaga kependidikan tak sampai 50 persen. Dari 5,6 juta yang harus divaksin, baru sekitar 1,5 juta orang yang sudah divaksin. Tak ada kata lain, pemerintah harus kejar tayang mengingat, masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapatkan vaksinasi lengkap.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi menekankan agar pemerintah tidak membuka sekolah yang guru atau tenaga pendidiknya belum divaksinasi, karena hal tersebut bagian dari perlindungan terhadap Covid-19.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta masyarakat tak mengkhawatirkan penerapan PTM Terbatas ini. Karena PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah secara otomatis akan menganulir kebijakan PTM Terbatas.

“Kalau PPKM terjadi di daerah anda, ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas. Tapi hanya untuk dua minggu tersebut (selama PPKM). Sektor pendidikan harus PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) selama PPKM tersebut,” tegas Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Nadiem menerangkan, PPKM adalah suatu hal satu keharusan yang dialami banyak sektor. Karena, PPKM menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah, di kelurahan, di desa yang memiliki banyak kasus positif Covid-19. “Sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa *by pass*, bisa saja menganulir proses pembelajaran tatap muka terbatas,” lanjut Nadiem. ● tim



Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sebelum Pembelajaran

Setelah Pembelajaran

-  Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
-  Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
-  Memastikan ketersediaan masker.
-  Memastikan thermogun berfungsi dengan baik.
-  Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

-  Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
-  Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
-  Memeriksa ketersediaan sisa masker.
-  Memastikan thermogun berfungsi dengan baik.
-  Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Sumber : Kemendikbudristek

MEMENTUKAN



Apakah semua orang tua setuju mengirim anak mengikuti PTM terbatas?



Sumber : Kemendikbudristek

Infografis : Andri Nurul

KELOMPOK UMUR POSITIF COVID-19 NASIONAL



50%

25,1%

MENINGGAL

SEMBUH

DIRAWAT/ISOLASI

POSITIF

0,6%

0,6%

2,7%

3%

3,1%

2,9%

10,2%

22,1%

29,6%

11,2%

21,2%

28,5%

25,5%

10,4%

11,3%

22,4%

29%

24,7%

0-5

6-18

19-30

31-45

46-59

≥60

Data per tanggal 22 Juni 2021

Sumber : Covid19.go.id

STRATEGI PEMBELAJARAN

Pengelolaan & Jadwal Pembelajaran Campuran di Satuan Pendidikan



Rencana & Jadwal Pembelajaran campuran di Kelas/Mapel



Pengelolaan & Jadwal Pembelajaran Campuran & PJJ di Satuan Pendidikan



Rencana & Jadwal Pembelajaran campuran dan PJJ di Kelas/Mapel



Jangan Paksaan PTM

Mobilitas penduduk Indonesia saat pandemi Covid-19 masih sangat tinggi. Protokol kesehatan pun masih banyak yang abai. Dampaknya adalah ledakan kasus Covid-19 semakin mengkhawatirkan, terutama di Pulau Jawa dan Bali.



KEMENTERIAN
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset dan
Teknologi
(Kemendikbudristek)
merencanakan,
Pembelajaran
Tatap Muka

(PTM) Terbatas akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, yakni tahun ajaran 2021/2022 pada pertengahan Juli 2021. Langkah tersebut diambil guna meminimalisir learning lost (kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar) pada siswa yang sudah lebih dari setahun tidak merasakan atmosfer lingkungan sekolah.

Belajar dan bertatap muka secara langsung dengan guru di sekolah, tampaknya masih sulit terwujud. Hal ini dikarenakan sebaran Covid-19 di Indonesia makin menjadi-jadi. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19.

Menurut Puan, sebaiknya pemerintah tidak memaksa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka jika masih dapat dilakukan secara daring hingga pandemi Covid-19 benar-benar dapat terkendali. Dirinya meminta kepada para pemangku kebijakan yang menentukan pembelajaran

tatap muka, agar menimbang seluruh masukan dari orang tua sebelum memulai kembali pembelajaran di sekolah pada masa pandemi.

“Tolong tampung aspirasi orang tua yang tidak mau pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka harus ada persetujuan orang tua, tidak dipaksakan,” tegas Puan.

Meskipun direncanakan akan dilaksanakan secara terbatas, ketika nanti diberlakukan, pembelajaran tatap muka pada masa pandemi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus benar-benar memastikan sekolah dan lingkungan sekolah memenuhi sejumlah syarat yang termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Di antaranya sekolah dan lingkungan sekolah harus memiliki sarana dan prasarana protokol kesehatan beserta penunjangnya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun. Selain itu, ketika akan memulai pembelajaran tatap muka, para guru dan orang tua murid harus dipastikan sudah divaksinasi.

“Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/ml

tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus Corona,” ungkap Puan.

Puan menuturkan, sistem tes dan lacak Covid-19 juga harus diperbaiki oleh pemerintah daerah, satgas penanggulangan Covid-19, dan para pihak terkait. Para guru dan tenaga pendidikan juga harus dipastikan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR.

“Sistem tes dan lacak harus diperbaiki. Apabila ada kasus harus dilacak hingga kontak ke-30. Sekolah harus di luar ruangan, dan bila di ruang tertutup harus ada penyaring partikel udara,” urai Puan. ● rnm/er

Tunda Pembelajaran Tatap Muka



WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda uji coba sekolah tatap muka menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

“Mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah”

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah taktis untuk menghambat lonjakan penyebaran Covid-19, termasuk menunda menggelar uji coba pembelajaran tatap muka.

“Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi”

Pemerintah juga perlu membuat kebijakan dan sanksi dalam penanganan kasus lonjakan Covid-19 saat ini dengan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Ya tentunya nanti kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam sanksi, itu disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing”

Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Jaka/rvi



Tingkatkan Vaksinasi di Pondok Pesantren



WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di pondok pesantren, terutama bagi para kiai, nyai, dan guru.

“Apalagi sekarang banyak varian baru yang disebut lebih cepat menular. Jadi walaupun tidak semua (kiai yang meninggal dunia) terkonfirmasi Covid, tapi melihat seringnya kasus itu di waktu berdekatan ya patut kita waspada”

Para kiai dan nyai adalah sosok sentral di ponpes yang dibutuhkan perannya dalam mendidik santri. Pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi bagi mereka agar ponpes tetap eksis dan stabil.

“Buat kampanye dan sosialisasi secara terus menerus tentang pandemi ini di pesantren. Dan kalau perlu lakukan penyekatan dan pengetatan mobilisasi di pesantren secepatnya”

Para wali santri dan warga diimbau sementara waktu untuk tidak berkunjung ke pesantren. Bagi santri yang keluar dan ingin kembali, harus di-*screening* ketat sebelum mereka masuk ke dalam pesantren.

“Potensi penyebaran di pondok pesantren yang tinggi karena yang dari luar kota banyak. Kalau tidak di-*screening*, kalau ada yang positif, kan berisiko nanti bisa masuk (karantina) lagi”

Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin
Iskandar. Foto: Gerak/rvi



PTM Perlu Ditinjau Ulang

Terhitung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia masih diliputi pandemi Covid-19. Aktivitas rakyat Indonesia pun nyaris lumpuh, termasuk dalam hal pendidikan. Bertahan dengan opsi yang tersedia jadi harapan melawan pandemi. Bukan berarti opsi yang tersedia adalah opsi terbaik. Memilih di antara pilihan yang pelik, satu di antaranya adalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).



PER Juli 2021, pemerintah akan melaksanakan kebijakan Sekolah Tatap Muka berdasarkan keputusan Surat Keputusan

Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

Di dalam SKB telah terlampir panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Walapun begitu, terjadi perdebatan pasca kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim secara daring pada tanggal 30 Maret 2021 lalu. Terlepas adanya tren lonjakan kasus Covid-19, dirinya menegaskan PTM ini akan diterapkan terbatas dengan menyesuaikan kategori zona risiko Covid-19 di masing-masing daerah Indonesia.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar pelaksanaan PTM ditunda baik di Pulau Jawa maupun daerah zona merah di luar pulau Jawa.

Ia memperhatikan lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan ini dapat membawa bencana bagi keselamatan murid, guru, tenaga pendidik, dan keluarga.

“Seluruh daerah Jawa dan zona merah di luar pulau Jawa, jangan dipaksakan

untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka. Kondisi saat ini tidak memungkinkan,” jelas Syaiful Huda. Di sisi lain, ia ingin agar Kemendikbudristek beserta pemerintah daerah terus meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di kalangan guru dan tenaga pendidik yang sampai saat ini dinilai masih jauh dari target.

Perlu diketahui, salah satu syarat terselenggaranya PTM pada bulan Juli ini adalah setiap guru dan tenaga pendidik wajib melakukan vaksinasi. Namun berdasarkan informasi yang diterima, vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 48, 59 persen dari total 5, 6 juta. Jika target tersebut tidak tercapai, maka akan membawa konsekuensi yang cukup berat.

Politisi Fraksi Partai PKB menyayangkan sikap Kemendikbud Ristek yang lebih fokus pada kegiatan sosialisasi dibandingkan mengejar pencapaian target dan syarat pelaksanaan PTM terbatas. Padahal, kegiatan PTM ini perlu dipersiapkan dengan matang. Jika hanya mengandalkan sosialisasi, menurut Syaiful, PTM hanya harapan belaka.

“Jadi, ini melenceng dari target sebenarnya. Imbauan Kemendikbud Ristek untuk kekeuh PTM itu enggak relevan. Saya kira, apakah tetap terjadi PTM secara masif dan serentak? Jawabannya hampir pasti tidak.” Terangnya. Kekhawatiran munculnya kluster besar yang berasal dari sekolah menjadi perhatian khusus Komisi X DPR RI.



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Tim/mv



Wakil Ketua Ketua Komisi X DPR RI
Dede Yusuf. Foto: Jaka/mvi

JANGAN SAMPAI KEBIJAKAN PTM MENJADI BUAH SIMALAKAMA, YANG TUJUAN AWALNYA BAIK, NAMUN MEMBAWA PETAKA UNTUK MASA DEPAN GENERASI INDONESIA.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bergerak dalam giat sedekah kuota internet bagi anak-anak yang membutuhkan. Giat ini memang terbayang sebagai ide yang sederhana, namun dengan adanya keterlibatan masyarakat tentu dampaknya akan besar.

“Momentum ini bisa kita jadikan semangat gotong-royong dalam mensukseskan pendidikan di-era pandemi.

Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh pihak untuk menggerakkan kegiatan sodakoh kuota untuk anak-anak yang membutuhkan,” pintanya.

Senada dengan Syaiful, Dede Yusuf ikut menekankan, urusan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Maka, dengan mempertimbangkan kondisi terkini, segenap pemangku kebijakan dan masyarakat memang sudah harus bersatu padu untuk bisa bertahan dalam kondisi yang pelik.

Memang, saling bahu-membahu dalam kondisi yang pelik untuk melindungi generasi bangsa harus menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, jangan sampai kebijakan PTM menjadi buah simalakama, yang tujuan awalnya baik, namun membawa petaka untuk masa depan generasi Indonesia. ● ts/er

SEDEKAH KUOTA

Berupaya menekan lonjakan kasus Covid-19, Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhitung berlaku 3 -20 Juli 2021 di pulau Jawa dan Bali. Pada saat yang sama, tahun ajaran pendidikan Indonesia telah dimulai. Namun, dengan situasi dan kondisi terkini, Mendikbudristek masih belum memberikan keputusan tegas. Padahal keselamatan murid, guru, tenaga pendidik, dan keluarga harus menjadi prioritas teratas.

Syaiful Huda paham bahwa pembelajaran tatap muka memang sangat penting dalam meningkatkan prestasi anak didik. Dirinya pun mengetahui capaian Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama kurang lebih 1,5 tahun memunculkan berbagai macam persoalan, seperti minimnya sarana prasarana yang menyebabkan learning

loss, berubahnya status pelajar menjadi pekerja akibat kesulitan ekonomi, dan perkawinan dini.

Namun, ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satgas Covid-19, 50 hingga 100 sekolah dari sejumlah daerah di Indonesia, hanya ada 3 sampai 5 sekolah yang siap secara aturan protokol kesehatan. Tentu, angka tersebut perlu menjadi bahan tinjauan ulang pelaksanaan PTM. Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah masih menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi negara. Sulitnya membeli kuota internet akibat terkendala dana jadi permasalahan utama bagi anak-anak untuk mengakses materi pembelajaran. Apalagi, menurut Syaiful, pengadaan kuota internet dari APBN sudah tidak ada.

Efektifkan Guru Kunjung

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diwacanakan akan dimulai di bulan Juli 2021 oleh Kemendikbudristek menemui kendala. Dimana saat ini, angka penularan Covid-19 di Indonesia sedang melonjak. Mau tak mau, harus ada metode lain agar generasi bangsa tidak mengalami Learning Loss dan Lost generation.



MELIHAT realitas yang sedemikian rupa di lapangan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai metode guru kunjung dapat menjadi

salah satu alternatif dalam menyiasati jika PTM Terbatas tak bisa dilaksanakan.

Dengan menimbang keterbatasan fasilitas di banyak daerah, pembelajaran luring menurutnya akan lebih layak, terutama untuk daerah-daerah 3T, pedesaan, dan wilayah-wilayah dengan kondisi

geografis menantang. Metode yang dapat dioptimalkan adalah guru kunjung, dengan pembelajaran berkelompok.

“Jika mengarah ke opsi itu, pemerintah harus memberikan fasilitasnya, termasuk penyesuaian regulasi terkait dana BOS, misalnya untuk biaya operasional guru. Untuk siswa di daerah perkotaan dan dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan efektif, baiknya daring saja,” ujar Hetifah ketika diwawancarai tim Parlemenaria.

Sebelumnya, politisi Partai Golongan Karya itu setuju dengan akan dibukanya sekolah tatap muka terbatas di Juli 2021. Namun menimbang perkembangan kasus Covid-19 belakangan ini, terlebih dengan kemunculan varian delta yang menular lebih cepat, gagasan PKM menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ulang.

Kebijakan PTM pun tak lepas dari penolakan yang berkembang

dalam masyarakat. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan dukungan terkait PTM. PGRI sebelumnya mengklaim, mayoritas dan guru ingin sekolah dibuka. Sedangkan, 79,54 persen data KPAI, sekolah telah siap gelar pembelajaran tatap muka.

Di lain sisi, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga epidemiolog menolak PTM ini. Menurut mereka, di samping penularan melalui kelas ataupun area bermain sekolah, terdapat beberapa titik kritis dari pelaksanaan PTM ini, seperti perjalanan dari rumah maupun sarana transportasi. Sehingga dikhawatirkan ruang publik yang tidak dapat dikontrol penyebarannya tersebut menimbulkan risiko pada anak-anak.

Hetifah menilai, perbedaan sudut pandang keduanya sebaiknya dihadapi dengan membuat kebijakan yang mengakomodir semuanya, yang dapat diterapkan di Indonesia dengan wilayahnya yang luas. Kebijakan tersebut tidak dapat dipaksakan untuk wajib dibuka secara serempak ataupun kebalikannya.

“Menurut saya, baiknya pemerintah membuat kategorisasi, mana daerah yang wajib buka, mana yang opsional, mana yang tidak. Kategorisasi ini tidak hanya berdasarkan zona penyebaran Covid-19, tapi juga aspek-aspek lainnya seperti ketersediaan sarpras, progress vaksinasi GTK, akses internet, dan lainnya,” tandas Hetifah. ● hal/er



Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian.
Foto : Jaka/nvi

PPKM Otomatis Anulir PTM

Bagi dunia pendidikan, Pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat besar. Beberapa permasalahan harus segera diselesaikan, di antaranya penurunan capaian belajar, anak putus sekolah, kekerasan pada anak, hingga melonjaknya angka pernikahan dini.



MENTERI
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset dan
Teknologi
(Mendikbudristek)
Nadiem Makarim
mengatakan,
PTM Terbatas

menjadi salah satu solusi untuk menghindari *learning lost* pada generasi penerus bangsa. Untuk itu, Kemendikbudristek bersama tiga kementerian lainnya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memuat panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019.

Namun, akhir-akhir ini, tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan, bahkan kenaikan tersebut mencapai rekor baru dalam catatan di Indonesia. Per tanggal 6 Juli 2021, berdasarkan data yang dilansir dari covid19.go.id, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai angka 324.597 orang. Untuk menekan sebarannya, pemerintah per tanggal 3 Juli 2021 menarik rem dengan PPKM Darurat.

Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta masyarakat tak mengkhawatirkan penerapan PTM Terbatas ini. Karena PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah secara

otomatis akan menganulir kebijakan PTM Terbatas.

“Kalau PPKM terjadi di daerah anda, ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas. Tapi hanya untuk dua minggu tersebut (selama PPKM). Sektor pendidikan harus PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) selama PPKM tersebut,” tegas Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Nadiem menerangkan, PPKM adalah suatu hal satu keharusan yang dialami banyak sektor. Karena, PPKM menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah, di kelurahan, di desa yang memiliki banyak kasus positif Covid-19.

“Di dua minggu itu akan dilaksanakan (pelaksanaan PPKM), tidak ada tatap muka terbatas dibolehkan di desa atau kelurahan tersebut. Itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa mem-*by pass*, bisa saja menganulir proses pembelajaran tatap muka terbatas,” lanjut Nadiem.

Hingga saat ini, pelaksanaan uji coba PTM terbatas pada zona hijau dan kuning masih terbilang rendah. Pada zona hijau, baru sekitar 56 persen sekolah yang melaksanakan tatap muka. Sedang pada zona kuning masih 28 persen. Sedangkan secara menyeluruh, baru sekitar 15 persen sekolah di Indonesia yang melakukan PTM.

Terkait pelaksanaan PTM yang dilaksanakan pada bulan Juli ini, dia menyampaikan bahwa Juli adalah target PTM dapat terealisasi. Adapun vaksinasi pada semua guru menjadi upaya dalam mengakselerasi implementasi dari kebijakan tersebut, di samping dari SKB 4 menteri yang ditetapkan pada Januari 2021 lalu. Pada tahap selanjutnya setelah guru-guru tervaksin, sekolah akan memberikan tawaran kepada orang tua untuk memilih PTM atau PJJ bagi anaknya.

“Sebenarnya yang wajib memberikan opsi proposal, kita. Yang wajib memberikan opsi tatap muka pada saat selesai vaksinasi kedua adalah guru-gurunya,” ujar Nadiem.

Pelaksanaan PTM ini dalam teknisnya terdapat syarat yang diperuntukkan, yakni untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, jumlah maksimal peserta sebanyak 18 orang di tiap kelasnya, lima orang untuk SLB dan untuk PAUD maksimal lima orang dengan menerapkan protokol kesehatan. ● hal/er



Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: Tim/ntv

Target Vaksinasi Guru Molor

PTM Terbatas merupakan rencana pemerintah untuk menghindarkan generasi muda dari *lose learning*. Demi keberlanjutan generasi bangsa Indonesia, upaya tersebut memang patut didukung, namun konsekuensinya yang sangat berat harus menjadi perhatian pemerintah.



ADA banyak ikhtiar yang bisa dilakukan sebagai upaya mendukung PTM Terbatas. Salah satunya adalah dengan melakukan

percepatan vaksinasi kepada guru/pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Fenomena yang bertolak belakang adalah ketika pemerintah mengatakan bahwa target vaksinasi terhadap guru mundur dari target awal yaitu Juli 2021 menjadi Agustus 2021. Padahal, tahun ajaran baru di sekolah mulai pada bulan Juli.

Hingga pertengahan Juni 2021, angka vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan tak sampai 50 persen. Dari 5,6 juta yang harus divaksin, baru sekitar 1,5 juta orang yang sudah divaksin. Tak ada kata lain, pemerintah harus kejar tayang, mengingat masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapatkan vaksinasi lengkap.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi secara khusus menyoroti vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ia menekankan agar pemerintah tidak membuka sekolah yang guru atau tenaga pendidiknyanya belum divaksinasi, karena hal tersebut bagian dari perlindungan terhadap Covid-19.

“Sejak awal terdeteksi dari kluster kantor, kluster transportasi, kluster keluarga. Jangan sampai ada kluster sekolah. PSBB sosial, tempat kerja, tempat ibadah, sekolah masuk kategori

pembatasan. Kita harus menahan diri sampai betul-betul siap. Apa itu siap, yaitu di antaranya sudah dilakukan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan,” ujar Intan.

Politisi Fraksi PAN ini tidak sependapat jika PTM dibuka di sekolah yang berada di zona hijau. Ia beralasan, kedatangan murid atau guru bukanlah dari wilayah yang sama. “Datangnya guru dan murid *ga* bicara zonasi. Satu kecamatan zona hijau, ada yang zona kuning, kecamatan sebelah zona merah. Atau datang dari tempat lain Jabodetabek. Jadi tidak bisa lagi. Harus dijaga betul, jangan sampai ada kluster sekolah,” politisi Fraksi PAN ini.

Dirinya menyambut baik ketika pemerintah sedang mengupayakan untuk mendatangkan Vaksin Pfizer. Dimana, vaksin ini sudah dilakukan uji klinis dan dinyatakan aman untuk anak, sehingga Intan berharap agar pemerintah mengutamakan anak-

anak untuk menerima Vaksin Pfizer ini. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menyuntikkan vaksin sinovac kepada anak-anak usia 12-18 tahun.

“Tapi dengan tingginya angka Covid saat ini, hemat saya tidak bijak jika memaksakan PTM di tahun ajaran baru (Juli 2021), karena Covid sedang tinggi. Sangat berbahaya melakukan uji coba PTM,” kilah Intan.

Anggota Komisi IX DPR RI
Intan Fauzi. Foto: Erman/nvl



KESEHATAN MASYARAKAT DI ATAS SEGALANYA

Menanggapi wacana PTM Terbatas Juli mendatang, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengingatkan pemerintah bahwasanya kesehatan masyarakat sangat penting dan di atas segala-galanya. Ia berharap pemerintah cermat dalam mengambil setiap keputusan terutama menyangkut kesehatan masyarakat.

“Kesehatan masyarakat di atas segala-galanya. Grafik kasus Covid-19 terus alami kenaikan. Klaster-klaster bermunculan. Ini harus kita cegah bersama demi menekan penyebaran Covid-19,” ungkap Arzeti.

Politisi Fraksi PKB ini meminta pemerintah mengkaji secara mendalam soal pembelajaran tatap muka terbatas yang dikabarkan bakal mulai Juli mendatang. “Harus dilihat secara cermat dengan situasi yang ada saat ini. Saya rasa harus dikaji lebih mendalam, dipertimbangkan dengan sangat matang,” tuturnya.

Penolakannya terhadap pembelajaran tatap muka terbatas bukanlah pernyataan tak mendasar. Data terbaru dari IDAI menyatakan bahwa proporsi kasus positif Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 12,5 persen.

“Dari situ dikatakan 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak. Ini mengkhawatirkan,” tegasnya.

Arzeti berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi soal PTM terbatas. Namun kalau keputusan tetap harus dilakukan mengenai rencana itu, ia meminta jaminan kesehatan anak-anak saat pergi ke sekolah dan kembali ke rumah.

“Kita ingin menjaga anak-anak Indonesia tetap sehat, namun tidak mengabaikan pendidikannya. Keduanya sangat penting, namun tetap harus mengedepankan kesehatan anak yang utama. Sosialisasi pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan secara luas dan mempertimbangkan masukan dari orang tua serta anak-anak didik. Kita ingin Indonesia secepatnya lepas dari Covid-19,” harap Arzeti.



Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina. Foto: Jaka/mvl

KITA INGIN MENJAGA ANAK-ANAK INDONESIA TETAP SEHAT, NAMUN TIDAK MENGABAIKAN PENDIDIKANNYA. KEDUANYA SANGAT PENTING, NAMUN TETAP HARUS MENGEDEPANKAN KESEHATAN ANAK YANG UTAMA

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelaksanaan PTM harus didahului penyuntikan vaksin terhadap seluruh guru dan tenaga pendidik. Hal itu guna meminimalisasi potensi penularan virus corona di lingkungan sekolah.

Namun demikian, terkini Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengatakan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan baru mencapai 35 persen dari target yang telah ditetapkan.

Ia menyebut persentase tersebut sudah termasuk guru dan dosen. Dengan demikian, katanya, dari 5,5 juta jumlah pendidik dan tenaga pendidikan, sudah lebih dari 2 juta yang mendapatkan vaksinasi. ● rnm/er



Simalakama Pembelajaran Tatap Muka

Oleh; Syukri Rifai
(Praktisi Pendidikan, Pengajar di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta)

Tren masyarakat yang terpapar positif Covid-19 kian menanjak sejak Juni 2021 membuat Indonesia memasuki gelombang kedua pandemi ini. Kurvanya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang pertama. Pemerintah pun meminta agar masyarakat beraktivitas kembali dari rumah sebab kasus terkonfirmasi covid-19 sebagaimana data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dirilis laman <https://covid19.go.id> per 30 Juni 2021 sudah menembus 2 juta jiwa. Hal ini kembali berdampak pada situasi sosial di masyarakat seperti era *lock down* di gelombang pertama. Situasi ini tentu menyulitkan pelbagai sektor, termasuk dunia pendidikan.

Lalu, SKB 4 Menteri yang menyepakati diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di tahun pelajaran 2021-2022 apakah akan tetap berjalan?. Mengingat data menyajikan bahwa satu dari delapan pasien covid-19 di Indonesia ialah anak tentu mengkhawatirkan. Fakta lainnya ialah tingkat kematian anak akibat covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi, yaitu 12,5%. Pemberlakuan PPKM hingga tingkat kelurahan dan desa membuat pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru pun kembali remang, setelah beberapa daerah di Pulau Jawa kemudian menghentikan uji coba tatap muka. Tingginya kasus tentu harus jadi variabel yang perlu dipertimbangkan.

Ada banyak kondisi yang mendorong

pemberlakuan PTM setelah kurang lebih tiga semester Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Masih adanya peserta didik yang tidak memiliki akses ke teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil merupakan realita nyata. Padahal mafhum bersama bahwa jantungnya PJJ adalah daring. Kendala teknologi pula yang membuat banyak anak-anak amat terbatas bahkan sama sekali tidak memiliki kontak dengan guru. Faktor orang tua menjadi pertimbangan lain PTM terbatas *kudu* dilakukan. Karena tidak semua orang tua memiliki bekal sama sebagai guru untuk anak-anaknya, baik dari faktor akademik maupun mental. Ketidaksiapan orang tua atau orang dewasa di rumah dalam membimbing dan mengajarkan anak di rumah amat memungkinkan memicu konflik kekerasan di rumah berlipat ganda saat sekolah ditutup.

Bagi banyak sekolah terutama swasta, pelaksanaan PTM bagai buah simalakama. Jika tak diberlakukan akan sangat berpengaruh pada menurunnya input peserta didik saat PPDB. Tuntutan orang tua yang seperti kehabisan bensin dalam mendampingi anak pun perlu diperhatikan. Belum lagi kekhawatiran adanya *learning loss* dan faktor guru yang dituntut terus menerus mencari metode baru agar anak tetap semangat belajar.

Dan, jikalau PTM diberlakukan ada banyak hal yang *kudu* dipersiapkan sekolah. Hal ini agar pendidikan di awal tahun ajaran baru nanti berjalan

optimal dan setiap anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya. Sekolah harus memperbaiki diri agar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Perangkat keras berupa sarana pra sarana yang mendukung protokol kesehatan menjadi list teratas. Lalu menyiapkan SDM terutama guru, anak didik, dan tenaga kependidikan yang akan bertemu langsung juga harus dibekali literasi kesehatan paling mendasar. Tentu tak mudah, karena sekolah berpacu dengan waktu dalam situasi *unpredictable* ini.

KENISCAYAAN BLENDED LEARNING

Pada akhirnya, setiap pandemi ada ujungnya, era new normal adalah bentuk adaptasi kehidupan setelahnya, dan cepat atau lambat PTM akan terwujud juga. Dalam konteks PTM yang akan diselenggarakan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, menyiapkan beragam rencana terkait KBM. Hal ini mencakup kegiatan tatap muka, daring (*online*), luring (*offline*) atau percampuran ketiganya (*blended*). Penulis berasumsi PJJ masih banyak yang akan menerapkan untuk tahun ajaran baru ke depan, terutama di Pulau Jawa. Namun, PJJ bukan lagi menjadi pilihan statis. Pihak sekolah harus merekayasa beragam metode pembelajaran yang kini banyak dikenal sebagai *blended learning* ataupun *hybrid learning*.

Melalui *blended learning* ini, mengutip Noord (2007) yang membagi empat



model pembelajaran elektronik, situasi pembelajaran tatap muka sebagai *live synchronous* dan pembelajaran daring sebagai *virtual synchronous* bisa jadi pilihan utama bagi sekolah yang sudah mendapat lampu hijau. Pilihan di belakangnya bisa dengan mempertahankan komposisi daring dan luring atau *self-paced asynchronous* yang sudah diaplikasikan di tahun ajaran 2020/2021 lalu di situasi tertentu. Bahkan untuk kelas-kelas tinggi (SMP-SMA-Kuliah) model pembelajaran kolaboratif atau *collaborative asynchronous* amat memungkinkan untuk diterapkan.

Kedua, fleksibilitas ruang dan waktu. Penerapan PTM harus mengacu kepada SKB 4 Menteri yang kemudian dikuatkan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021. Intinya penyelenggaraan PTM situasional. Harus memperhatikan rambu PPKM dan zonasi pandemi di daerah masing-masing, apakah zona merah, oranye, atau hijau. Hal ini menjadikan PTM fleksibel dalam penerapannya. Dalam konteks rentang ruang, tidak mesti dalam sebuah bangunan kelas, dan dalam konteks waktu tidak bisa diseragamkan di tiap sekolah. PTM bisa diterapkan sedari awal di tahun ajaran baru hingga

sepanjang tahun pembelajaran, bisa pula diterapkan dan dihentikan di tengah perjalanan. Lagi-lagi sekolah harus mampu mengadaptasi kemungkinan-kemungkinan ini.

Ketiga, efektifitas dan efisiensi pertemuan saat tatap muka. Faktor inilah yang membuat pemilihan dan pemilahan kompetensi dasar (KD) esensial yang hendak dicapai oleh guru *urgent* dilakukan. Mengingat waktu PTM saat pandemi terbatas dan banyak terpankas dibandingkan waktu normal. Saat tatap muka guru harus lebih banyak mengedepankan *human touch*, penguatan karakter dan pengasahan skill keterampilan yang minim didapatkan saat daring. Guru tidak boleh terjebak pada pemberian materi dan mengejar KD yang mesti dicapai anak didik. Sisi humanis dan pola hubungan antara sesama memiliki porsi terbesar di PTM ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan bersama.

Keempat, wewenang orang tua dalam mengizinkan anak didik mengikuti PTM menjadi harga yang tak bisa ditawar. Adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pembelajaran yang sama dengan yang lain. Sekolah harus bisa memfasilitasi kondisi ini, saat

beberapa anak didik bisa PTM karena adanya izin orang tua, anak didik yang belum memungkinkan PTM pun harus mendapatkan akses pembelajaran dan penilaian yang sama dengan metode yang *adaptable*. Tak ada pula *punishment* bagi anak didik yang tidak diizinkan mengikuti PTM.

Kelima, membekali guru, tenaga pendidikan, anak didik, dan orang tua dengan literasi kesehatan yang kuat. Saat sebelum dan sesudah PTM disampaikan pentingnya 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi serta interaksi, dan pada praktiknya hal terus menerus dilakukan agar terinternalisasi dalam kebiasaan bersama. Setelah berbulan-bulan berada di kondisi pandemi, satu hal yang menjadi perhatian bersama dan perlu digarisbawahi bahwa kerinduan berkumpul sering kali membuat anak didik maupun guru abai dan terlena, terutama pada soal interaksi dan menjaga jarak. Guru memainkan peran sebagai *role model* bagi anak didiknya dalam hal ini. Hemat penulis, pembiasaan 5M ini sudah seharusnya menjadi *habitual curriculum* di setiap sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

Terakhir, kedisiplinan masyarakat sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Di sekolah guru menjadi teladan terbaik untuk kontinuitas 5M ini, dan di rumah orang tua menggantikan peran tersebut untuk para anaknya. Jikalau program vaksinasi bagi guru, anak didik maupun masyarakat belum maksimal, maka disiplin menjaga protokol kesehatan menjadi keniscayaan. Hal ini agar keberlangsungan PTM tidak menimbulkan klaster covid-19 baru serta ada garansi ketenangan para *stakeholder* sekolah ketika PTM diterapkan. Semoga kedisiplinan 5M ini menjadi penekan laju pandemi hingga berakhir dan bumi Indonesia semakin membaik. *Tabik.* ●

Komisi VIII DPR RI memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah. Hal ini menyusul langkah pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun 2021 ini.

“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Dana haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI. Sejauh pengamatannya, Ace memastikan tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN). “Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” ujar Ace.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dana haji tersebut juga ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu menurutnya memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

Mengingat dana haji ditempatkan dengan skema SBSN, maka bagi siapa pun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya. Namun, ada

Pastikan Keamanan Dana Haji Aman



kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

“Yaitu ya rata-rata flat di angka 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk diantaranya soal surat berharga syariah negara itu,” paparnya.

Dengan skema tersebut, jemaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji. Contohnya

pembiayaan total haji per orang untuk 2019 lalu sesungguhnya mencapai Rp70 juta sementara jemaah haji hanya membayar Rp35 juta. “Nah dari mana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman,” ucap Ace.

Ia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut. Kalau ada sesuatu yang



KALAU, MISALNYA, MASYARAKAT MENARIK DANA HAJI, ITU DIPERBOLEHKAN, TAPI TENTU NANTI ADA KONSEKUENSI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Tim/nvl

meragukan informasi tersebut sebaiknya kata dia *tabayyun* (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.

“Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya, misalnya, dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, dana haji yang bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH. Setoran Rp25 juta itu dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.

“Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jemaah. Jemaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp64 juta-Rp70 juta setiap jemaah. Untuk mencukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya,” jelas politisi Fraksi PKB itu.

Marwan memastikan, DPR akan selalu mengawasi dan meminta perkembangan kelolaan ke BPKH agar uang haji dapat dipantau dalam prosedur yang baik dan menghasilkan. Mengenai isu di media sosial yang

menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, legislator dapil Sumatera Utara II itu menilai isu tersebut sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab agar masyarakat resah.

Lebih lanjut kinerja BPKH bakal dipantau ketat karena mengelola iuran penyelenggaraan haji. Anggota Komisi VIII Rudi Hartono Bangun mewanti-wanti agar jangan sampai pengelolaan iuran dana haji itu salah dan merugikan jemaah.

“(Kinerja) BPKH ini kita awasi. Jangan sampai seperti itu (pengelolaan salah) saya bilang,” kata Rudi. Salah satu bentuk pengelolaan

dana haji yang dilakukan BPKH yaitu melalui investasi syariah.

Politisi Partai NasDem itu juga mewanti-wanti investasi yang dilakukan harus jelas dan pastinya menguntungkan. Jangan sampai bernasib seperti PT Jiwasraya akibat salah investasi. “Investasi yang *nggak* jelas seperti Jiwasraya, kan penjahat itu. Mereka mengelola uang nasabah dimainkan,” ungkapnya.

Rudi menyampaikan BPKH telah memberikan jaminan pengelolaan yang dilakukan secara baik dan tepat. Hal itu berdasarkan pengakuan Kepala BPKH Anggito Abimanyu. “Tapi kalau mau kita ketahui yang pasti tentunya melalui audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sebutnya.

Selain itu, legislator dapil Sumatera Utara III tersebut menyambut baik keputusan pemerintah yang memperbolehkan calon jemaah haji (calhaj) 2021 menarik BPIH yang telah dilunasi. Penarikan pelunasan tersebut tak akan menghilangkan status mereka menjadi calhaj 2022.

Namun, dia meminta jemaah bijak mengambil keputusan apakah akan menarik atau tetap menyimpan di BPKH. Keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan. “Kalau tidak terlalu mendesak tetap disimpan. Kalau mereka butuh tidak ada salahnya mereka mengambil untuk kepentingan yang lebih penting,” pungkasnya. ● **tn/es**



“KALAU TIDAK TERLALU MENDESAK TETAP DISIMPAN. KALAU MEREKA BUTUH TIDAK ADA SALAHNYA MEREKA MENGAMBIL UNTUK KEPENTINGAN YANG LEBIH PENTING,”

Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto: Tim/nvl

Pengampunan 'Dosa' Pajak Cukup Sekali Seumur Hidup

Rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali *tax amnesty* atau pengampunan pajak akan segera bergulir. Aturan pengampunan pajak itu termasuk dalam materi Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Hingga akhir Juni 2021, RUU KUP masih dalam proses pembahasan di Komisi XI DPR RI. Beleid berbentuk omnibus law tersebut, nantinya akan mengatur berbagai aturan termasuk penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga *tax amnesty*. Mengingat telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, Komisi XI DPR RI

menyepakati bahwa pembahasannya dilakukan secara cermat, objektif dan terukur sehingga dapat mencapai sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkesinambungan.

Sampai saat ini, sistem perpajakan dinilai belum mampu untuk mendukung sustainabilitas pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi APBN beberapa tahun terakhir, dimana belanja selalu meningkat sesuai perkembangan kebutuhan bernegara dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.

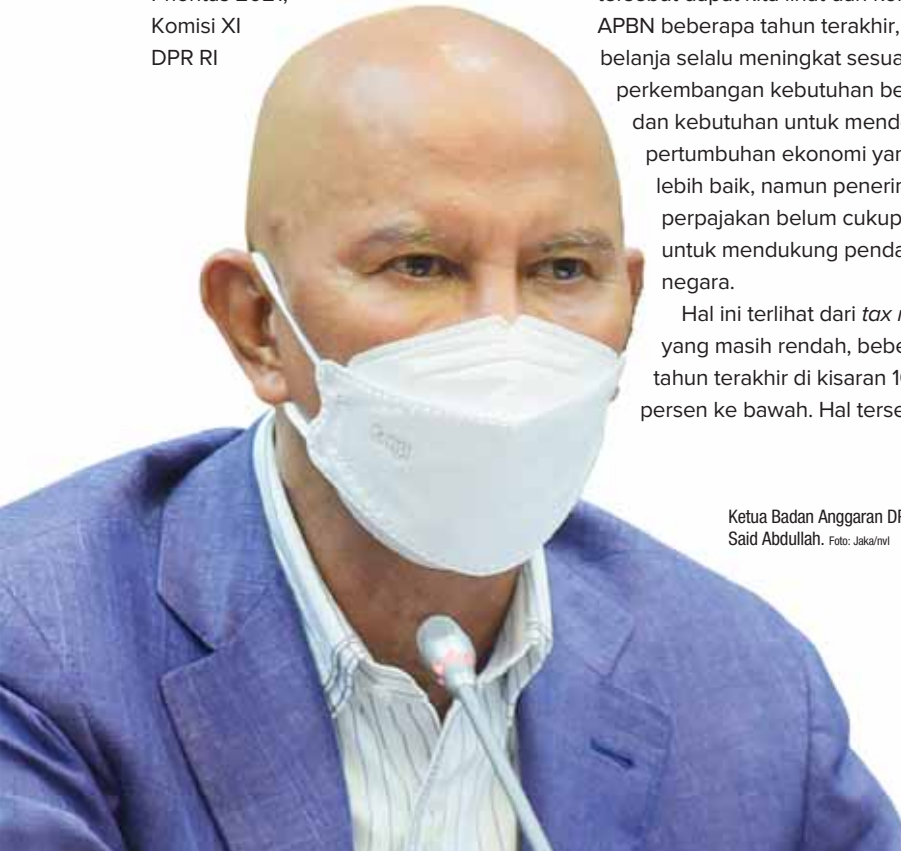
Hal ini terlihat dari *tax ratio* yang masih rendah, beberapa tahun terakhir di kisaran 10 persen ke bawah. Hal tersebut

menyebabkan defisit anggaran meningkat, terlebih dalam masa Pandemi Covid-19, membutuhkan dana lebih untuk menangani masalah kesehatan dan program pemulihan ekonomi dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit APBN harus dikembalikan pada level di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Terkait *tax amnesty*, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali pengampunan pajak tidak diperlukan. Sebab hal tersebut dinilai akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* jilid pertama yang baru dilakukan 2016 lalu. Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan *sunset policy* sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya.

"Kalau setiap lima tahun kita lakukan *tax amnesty*, tingkat *compliance* kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak *good governance* dan tidak mendukung petugas pajak kita. *Masak* tiap lima tahunan ada *tax amnesty*. Intinya enggak ada itu *tax amnesty* jilid II. Bahkan, dalam revisi UU KUP kami harap tidak muncul. *Tax amnesty* hanya satu kali seumur hidup," kata politisi PDI-Perjuangan itu saat diwawancarai **Parlementaria**, akhir Mei lalu.

Sebagai informasi, *tax amnesty* merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Sementara *sunset policy* digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan



Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/mvl

pelunasan pembayaran pajak. Keduanya sudah pernah diberlakukan oleh pemerintah.

CEDERAI RASA KEADILAN WAJIB PAJAK

Pemerintah beralih akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Melalui *tax amnesty*, pemerintah menargetkan tambahan pendapatan perpajakan mencapai Rp165 triliun. Jumlah tersebut sempat menjadi target pada *tax amnesty* yang bergulir pertama kali pada tahun 2016. Namun, dana repatriasi yang berhasil masuk hanya sebesar Rp135 triliun, atau hanya 81 persen dari target yang diimpikan.

Secara psikologis, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai jika *tax amnesty* tetap diberlakukan maka akan berdampak buruk karena menciptakan pemahaman baru di masyarakat, yaitu 'lebih baik tidak patuh membayar pajak karena akan ada *tax amnesty* lagi'. Menurutnya, hal tersebut tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan Indonesia serta mengingkari komitmen *tax amnesty* pertama kali pada 2016 lalu.

"*Tax amnesty* hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Pelaksanaan *tax amnesty* jilid II akan meruntuhkan kewibawaan otoritas, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta *tax amnesty*, para wajib pajak yang patuh, serta wajib pajak yang sudah diaudit, tentu akan tercederai," ungkap Andreas.

Pasca-amnesti, pemerintah bersama DPR sebenarnya telah menyepakati keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Andreas menilai, seharusnya penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan adil karena didukung data dan informasi yang akurat sehingga dapat dibuat klasifikasi wajib pajak menurut risiko. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

TAX AMNESTY HANYA DIBERIKAN SATU KALI DALAM SATU GENERASI.

Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo.
Foto: Ariel/rvi



perlu mengoptimalkan tindak lanjut data dan informasi perpajakan ini untuk mendorong kepatuhan pajak lebih baik.

"*Tax amnesty* bukan jawaban yang tepat atas *shortfall* pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan. Kebutuhan akan sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan sustain jauh lebih penting dan mendesak ketimbang *tax amnesty*," tegas Anggota Badan Legislasi DPR RI itu.

Guna memfasilitasi wajib pajak yang patuh dan mempertimbangkan kondisi pandemi, ia menyarankan pemerintah lebih baik membuat Program Pengungkapan Aset Sukarela atau Voluntary Disclosure Program dengan mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi. "Tarif lebih rendah dapat diberikan untuk yang

melakukan repatriasi, dan atau bisa juga menginvestasikan dalam obligasi pemerintah," tutup Andreas.

KLAIM KEPATUHAN PAJAK MENINGKAT

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja perdana RUU KUP di Komisi XI DPR RI pada akhir Juni lalu, sempat menyatakan bahwa *tax amnesty* menjadi salah satu senjata ampuh pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Tak hanya berkontribusi besar dalam peningkatan rasio kepatuhan pajak, program pengampunan tersebut sempat menorehkan catatan sejarah, menjadi salah satu yang paling berhasil di dunia.

"Program pengampunan pajak yang dilakukan tahun 2016 dan 2017 menjadi catatan bersejarah bagi Direktorat Jenderal Pajak karena termasuk sebagai program *tax amnesty* yang berhasil di seluruh dunia, dengan jumlah deklarasi mencapai Rp4.884 triliun, atau ini mencapai 39,3 persen dari PDB tahun 2016. Bayangkan 40 persen dari GDP kita yang tadinya tidak dideklarasikan kemudian dideklarasikan dalam *tax amnesty*," ungkap Menkeu.

Setelah periode *tax amnesty*, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) peserta *tax amnesty* lebih tinggi dibandingkan rasio kepatuhan nasional. Selain itu, pada periode setelah *tax amnesty*, PPh Tahunan orang pribadi peserta *tax amnesty* melonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan non peserta *tax amnesty* di tahun yang sama.

Program peningkatan kepatuhan pajak yang lain seperti *Sunset Policy*, yang dilakukan pada 2018 juga tercatat berhasil menjadi 5,6 juta WP dan menyumbang penerimaan hingga Rp7,46 triliun selama masa kebijakan tersebut yaitu 1 Januari 2008 hingga 29 Februari 2009. Program ini meliputi penghapusan sanksi bunga dan pembetulan SPT bagi WP lama dan WP baru. ● alw/sf

Pajak Sembako Berpotensi Sakiti Hati Masyarakat 'Kecil'

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok. Rencana tersebut dikabarkan akan diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI.

S etidaknya terdapat 11 barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Barang-barang yang tergolong dalam kategori tersebut diantaranya beras, gabah, jagung, kedelai, sagu, garam, daging, telur, susu, sayuran dan buah-buahan.

Kesebelas barang pokok tersebut, menurut dokumen RUU KUP yang beredar di publik pada Mei 2021, akan dihapuskan dari daftar bebas PPN. Padahal, Komisi XI DPR RI baru saja memulai pembahasan rancangan aturan tersebut bersama pemerintah mulai akhir Juni 2021. Pembahasannya diwanti-wanti untuk tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat masih berlangsungnya situasi pandemi, Pemerintah diminta untuk tetap fokus pada penanganan masalah kesehatan dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.

Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak

terhadap sembako pun menuai polemik, sejumlah anggota dewan menentang dan mendesak agar pemerintah melalui Menteri Keuangan meninjau ulang rencana tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto bahkan menyatakan bahwa pengenaan pajak sembako akan memperlihatkan bahwa pemerintah menekan rakyat 'kecil'. Sebab menurutnya, pemerintah masih bisa melakukan inovasi sumber penerimaan pajak baru

Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto. Foto: Jaka/mf



tanpa menyakiti hati rakyat.

"Sembako ini sensitif juga, sementara pajak mobil saja dibebaskan (PPnBM). Dalam mengejar penerimaan, pemerintah harus cari inovasi. Berkaca pada pembebasan PPnBM mobil tetapi akan mengenakan PPN sembako, akan menyakiti rakyat kita," kata politisi Partai Gerindra itu dalam pernyataan tertulisnya kepada *Parlementaria*, pertengahan Juni lalu.

PEMERINTAH PERLU TINJAU ULANG DAN HATI-HATI

Pemerintah dinilai perlu untuk meningkatkan penerimaan perpajakan agar dapat dioptimalkan untuk penanganan pandemi, yang ditujukan bagi kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Namun terkait pengenaan pajak sembako, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendesak agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut. Sebab hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya harga bahan pangan dan menurunkan konsumsi.

“Jika demikian, maka dikhawatirkan pula akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi karena konsumsi rumah tangga adalah kontributor terbesar bagi perekonomian, yaitu sebesar 57,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jangan sampai rencana ini justru malah kontraproduktif dengan upaya pemulihan daya beli masyarakat yang saat ini masih menjadi fokus kita bersama,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Tidak hanya perlu mengkaji secara komprehensif, Pemerintah juga perlu melakukan analisa mendalam dan hati-hati terhadap rencana tersebut. Menurut Puteri, PPN pada pada barang kebutuhan pokok dapat berpotensi melemahkan daya beli. Bahkan, juga dapat berpotensi memberikan tekanan bagi pedagang kecil akibat perubahan stabilitas harga dan permintaan dari masyarakat. Pun, hal ini mungkin berpotensi menimbulkan efek domino atas ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar.

“(Penerapan pajak sembako) harus dikaji secara mendalam dan menyeluruh oleh pemerintah, apalagi hal ini sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” tandasnya. Ketimbang menerapkan pajak sembako, Puteri menganjurkan pemerintah kembali meningkatkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan menyisir anggaran-anggaran yang tidak mendesak. Catatannya, jika efisiensi dilakukan Kemenkeu saja mencapai sekitar Rp1,25 triliun, tentu jika diakumulasikan dengan K/L lain maka jumlahnya bisa lebih besar lagi.

“Bahkan, BPKP menyebutkan dalam rapat yang lalu bahwa mampu mengefisiensi pengeluaran negara sepanjang 2020 hingga mencapai Rp48,35 triliun. Artinya, kita bisa lebih mengoptimalkan lagi kualitas belanja negara dengan menemukan alternatif penerimaan negara yang dapat memperkuat performa APBN ke depan,” pungkas Puteri.



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Ariel/mv

SKENARIO PEMERINTAH TERAPKAN PPN SEMBAKO

Per akhir Juni 2021, pemerintah bersama DPR baru memulai pembahasan RUU KUP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrati menyatakan pemerintah tetap akan memberikan fasilitas atau subsidi terhadap pajak atas barang dan jasa yang akan menjadi objek pajak baru, kecuali sembako dan sekolah yang akan tetap dikenakan PPN.

Menkeu mengatakan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal, atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi. Pengecualian tersebut merupakan rasionalisasi atas keadilan bagi masyarakat, apalagi ketiga komponen tersebut banyak dibutuhkan bagi masyarakat.

“Di sini kita bisa menggunakan subsidi menggunakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak menggunakan menarik PPN-nya, dalam rangka *compliance* dan memberikan targeting yang lebih baik,” kata Sri Mulyani saat hadir secara virtual dalam

Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, akhir Juni lalu.

PPN multi tarif, lanjut Mantan Direktur Bank Dunia itu, juga akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen. Rentang tarif dalam UU juga diubah lebih lebar menjadi 5 persen sampai dengan 25 persen. Menurutnya, basis penerapan perpajakan di dalam RUU perubahan revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sudah berbasiskan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Tidak hanya barang kebutuhan pokok, beleid tersebut juga akan menghapus barang hasil pertambangan atau pengeboran dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN. Adapun barang hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud seperti emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Selain memperluas objek PPN, RUU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. ● alw/sf

Revisi UU ASN Perlu Sesuaikan Perkembangan Zaman

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) telah ditetapkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2021. Hingga kini pembahasan RUU tersebut masih terus dilakukan Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR RI dengan menyerap aspirasi dan pandangan berbagai pakar dan akademisi melalui rapat dengar pendapat.

Sebelumnya, pengajuan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang UU ASN ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, di antaranya adalah UU ASN dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi ASN dan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengungkapkan selama 7 tahun berlaku, perlu ada penyesuaian-penyesuaian terhadap UU ASN yang menyangkut aspek-aspek kehidupan dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi.

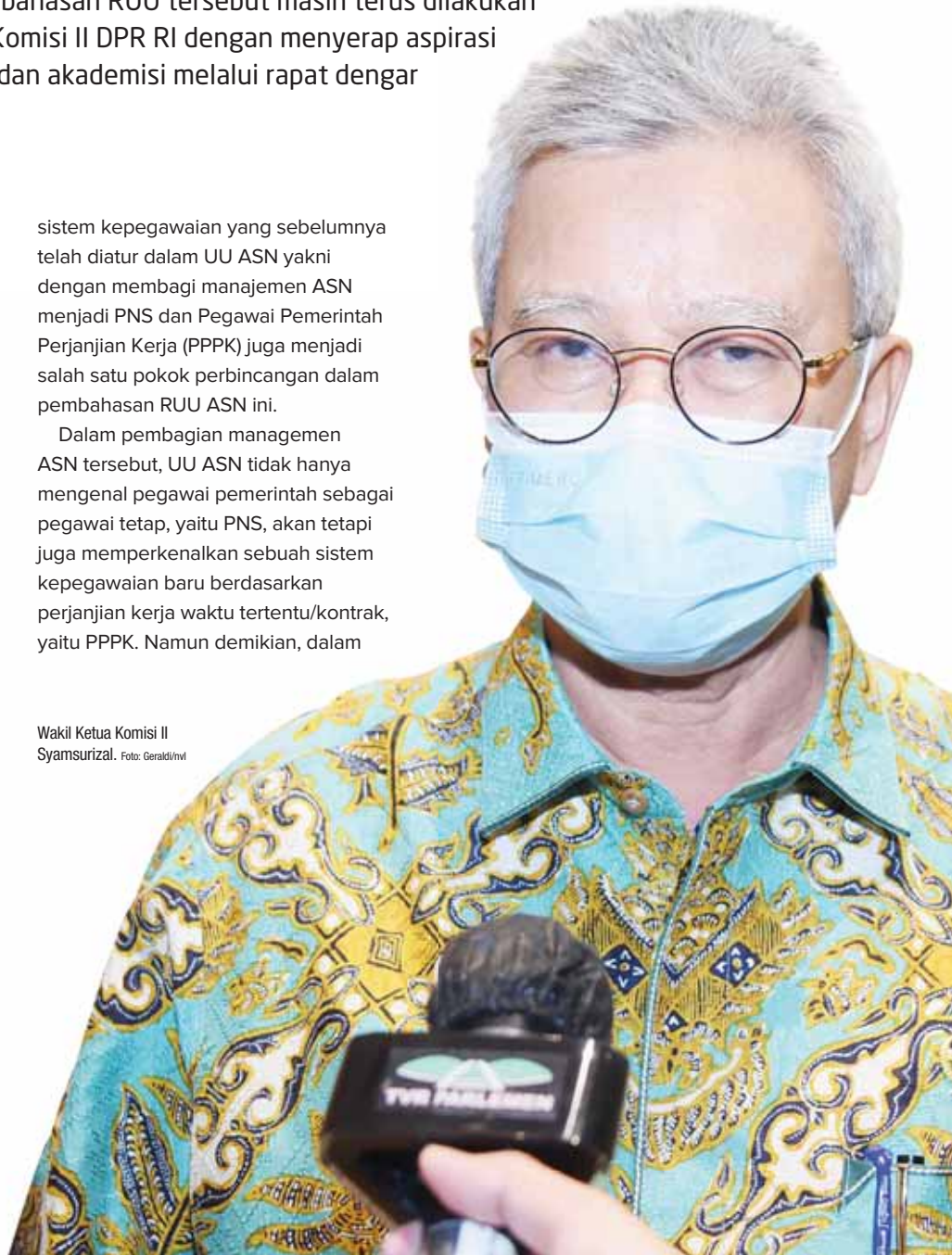
“Sebelumnya keberadaan UU (ASN) ini adalah dari UU Pokok-Pokok Kepegawaian yang diatur dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Kemudian, tentunya dalam perkembangan situasi yang sangat cepat dengan perubahan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi yang kita alami saat ini tentunya kita perlu melakukan semacam penyesuaian ulang,” ujarnya kepada **Parlementaria**, baru-baru ini.

Selain itu, masih kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, permasalahan mengenai perubahan

sistem kepegawaian yang sebelumnya telah diatur dalam UU ASN yakni dengan membagi manajemen ASN menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi salah satu pokok perbincangan dalam pembahasan RUU ASN ini.

Dalam pembagian manajemen ASN tersebut, UU ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak, yaitu PPPK. Namun demikian, dalam

Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal. Foto: Geraklindo



UU ASN sebelumnya sama sekali tidak dijelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian tersebut.

Untuk itu, harapnya, RUU ini diharapkan dapat memastikan dan menyempurnakan UU ASN dengan melakukan perubahan ketentuan, terutama mengenai manajemen rekrutasi dan kesejahteraan PPPK, Penegasan tentang status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya PNS dan PPK untuk menciptakan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap ASN.

Sebelumnya, Akademisi Prof. Dr. Eko Prasojito dalam RDPU dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, Pemerintahan Indonesia saat ini masih berada pada *Governance 1.0* yang masih berorientasi pada *bureaucratic-oriented political* model, sedangkan perkembangan *Public Governance* di dunia, saat ini sudah memasuki era *Governance 4.0* yang sudah berorientasi pada teknologi informasi.

“Pada kenyataannya memang terjadi *gap* yang besar antara revolusi industri 4.0 dengan *governance* atau ekosistem yang kita miliki pada saat ini. Yang sebenarnya masih berada di *governance 1.0*. Jadi kita harus loncat ini dari 1.0 kepada 4.0,” papar Eko.

DORONG PENGUATAN KOMISI ASN

Di sisi lain, persoalan mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ASN ini. Dalam sejumlah pertemuan dengan pemerintah, fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI berharap adanya penguatan terhadap KASN tersebut. Hal ini dikarenakan sistem meritokrasi tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kontrol yang kuat, sehingga

SAYA PIKIR KITA PERLU ADA KEBERANIAN WALAUPUN KONSEP AWAL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG AKAN MENGHAPUS KASN, TAPI DALAM PERKEMBANGANNYA JUSTRU INGIN KASN INI DIPERKUAT

penguatan KASN ini menjadi *concern* pembahasan yang penting.

Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan dukungannya terhadap keberadaan KASN yang sebelumnya diwacanakan untuk dihapus. Menurutnya, perlu ada penguatan kelembagaan terhadap KASN. “Jadi ini memang perlu kita pertegas supaya KASN ini lebih kuat dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga tentang regulasi untuk memperkuat KASN ini sendiri. Dan ini juga tercermin di dalam pengambilan keputusan (oleh KASN) dan juga apa yang dieksekusi rekomendasinya,” ungkapnya.

Selama itu, ia melihat regulasi yang mengatur tentang kelembagaan KASN masih belum diatur dengan jelas. Sehingga mempengaruhi kerja-kerja KASN yang belum bisa maksimal. “Saya melihat ini regulasinya seperti peraturan pemerintahnya juga masih kurang komisi ASN ini. Makanya kurang menggigit kalau saya lihat eksekusinya pun agak gimana ya separo-separo,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Arsyad juga menilai penguatan terhadap KASN bertujuan

salah satunya sebagai fungsi pengawasan terhadap merit sistem serta sebagai bentuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Sudah jelas disampaikan, bahwa tujuan, tupoksi dari KASN ini untuk mempercepat dan pengawasan dari *merit system*. Karena tujuan *merit system* ini terakhirnya bagaimana Indonesia hebat,” tambah legislator dapil Riau I ini.

Senada, Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko juga mengusulkan adanya penguatan terhadap KASN. Ia mengungkapkan bahwa konsep awal perubahan UU ASN yang akan menghapus KASN perlu diubah terlebih dahulu sebelum dibahas secara mendalam. “Saya pikir kita perlu ada keberanian walaupun konsep awal perubahan undang-undang akan menghapus KASN, tapi dalam perkembangannya justru ingin KASN ini diperkuat,” usulnya.

Selain itu, Heru juga mencontohkan di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, yang sudah menganut merit sistem tidak hanya dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga dalam partai politiknya. “Karena sebelum itu kami sudah berbicara *lho*, mestinya (KASN) justru diperkuat, karena kita yakin dari berbagai referensi negara-negara yang sudah maju itu mereka ketat menganut *merit system*, bukan hanya dalam birokrasi pemerintahan lingkungan pegawai negeri, bahkan juga dalam partai politik,” imbuhnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, sistem meritokrasi tidak dapat ditawarkan dan harus secara bertahap diperkuat dalam praktiknya. Oleh sebab itu KASN sebagai lembaga yang berperan dalam pelaksanaan merit sistem ini juga perlu diperkuat alih-alih dihapus. “Oleh karena itu sekali lagi (KASN) diperkuat dan sekali lagi saya pikir seiring dengan *merit system* di birokrasi pemerintahan, saya berpikir meritokrasi di partai politik. Saya kira menjadi keniscayaan kalau kita berpikir untuk Indonesia maju,” tutupnya. ● **bia/sf**



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat pidato Penandatanganan Nota Kesepahaman DPR RI dan BPIP RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021). Foto: Runi/Man



Anggota DPR RI Evita Nursanty saat dilantik sebagai Ketua Umum KBPP Polri yang digelar dengan protokol kesehatan ketat dengan tema: Keluarga Besar Putra-Putri Polri Solid dan Modern Bertekad Mendukung Transformasi Polri yang Presisi untuk Indonesia Maju di Jakarta Convention Center, Kamis (17/6/2021). Foto: Jaka/Man



Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar virtual teleconference antara Parlemen Indonesia-Afganistan dengan tema 'Empowering Women And Supporting Peace Process', di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/6/2021). Foto: Jaka/Man



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dihadapan para wartawan yang hadir dalam acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Tangerang, Banten, Jumat (18/6/2021). Foto: Jaka/Man



Inspektur Utama Setyanta Nugraha dan Inspektur II Furcony Putri Syakura saat launching SI MANIS, di Jakarta, Jumat (18/6/2021). Foto: Runi/Man



Anggia Ermarini Gagal jadi Presenter, Malah Pimpin Komisi IV DPR RI

Banyak Jalan Menuju Roma. Banyak Cara Menuju Sukses. Tidak bisa mewujudkan mimpi saat kecil untuk menjadi seorang presenter, Anggia Ermarini malah menjadi Anggota DPR RI.

Ya, antara presenter dengan Anggota DPR RI memiliki kesamaan, yaitu sama-sama penyambung lidah memang. Namun bedanya, jika presenter melalui media massa, sementara anggota DPR RI yang kini dipercaya ikut memimpin Komisi IV DPR RI ini menjadi penyambung lidah rakyat khususnya yang berada di Daerah pemilihan Jawa Timur VI yang meliputi Kota dan Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kediri melalui jalur legislatif. Berikut kisah yang dipaparkannya hanya pada Ayu dan Jaka dari *Parlementaria*.

CITA-CITA DI MASA KECIL

Usai memimpin rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Anggia menceritakan kisah masa kecilnya di salah satu daerah di Jawa Tengah, yakni Gondang-Sragen. Diakuinya masa kecil Anggia sejatinya tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Begitupun dengan didikan yang diberikan kedua orangtuanya, sama seperti pola didik yang diterima ketiga kakak dan adiknya. Ya, pagi hari Anggi harus sekolah umum di SD Gondang Sragen, sore harinya sekolah



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: Jaka/rvi

Diniyah dan malam harinya ia harus mengaji. Dari sana terlihat jelas jika kedua orangtua Anggia lebih banyak memberikan porsi pada pendidikan agama. Sehingga khusus untuk hal itu tidak ada tawar menawar. Namun untuk hal lain Anggia menilai kedua orangtuanya cukup demokratis di rumah.

Tak heran jika setiap hari Sang Ibu selalu memantau perkembangan mengaji Anggi dan saudara-saudaranya. Bahkan buku catatan mengaji pun selalu diperiksa Sang Ibu. Termasuk juga hafalan surat-surat dalam Al Quran. Diakui Anggia, entah kenapa prestasi belajarnya di Diniyah tidak secemerlang prestasinya di SD umum. Padahal tidak jarang pelajaran yang didapat di Diniyah, kembali diulang saat mengaji di malam hari. Meski demikian, tidak ada komplain dari sang ibu. Pasalnya, Sang ibu pun tahu usaha dan perjuangan anaknya.

Sebagaimana anak-anak seusianya, saat kecil Angga pun memiliki mimpi dan cita-cita. Jika teman-temannya memiliki cita-cita ingin jadi Polisi, Guru atau Dokter, Anggia berbeda. Ia malah ingin sekali menjadi penyiar radio dan televisi. Padahal Anggia kecil itu termasuk anak yang pemalu. Bahkan ketika ada tamu di rumahnya, ia selalu *ngumpet* di kamar. Begitupun saat ada acara di sekolah dan di rumah, tak jarang Sang Ibu mencubitnya karena tak jua berani tampil di muka umum saat ada acara.

“Saya juga enggak tau kenapa, saya pemalu sekali saat kecil, tapi kok pengen banget jadi penyiar radio atau televisi. Mungkin karena dulu orangtua saya selalu melihat acara berita di televisi (saat itu baru ada TVRI), dan saya tertarik sekali dengan para presenter saat itu. Bahkan kalau ada acara keagamaan di sekolah saya memang malu untuk tampil, tapi kalau untuk jadi MC saya senang sekali. Anekan?” cerita Anggia diiringi tawa.

Memasuki usia remaja awal, tepatnya saat masuk di bangku SMP, rutinitas Anggia tak jauh berbeda. Ia tetap harus

**SAYA JUGA ENGGAK
TAU KENAPA, SAYA
PEMALU SEKALI
SAAT KECIL, TAPI KOK
PENGEN BANGET
JADI PENSIAR RADIO
ATAU TELEVISI.
MUNGKIN KARENA
DULU ORANGTUA
SAYA SELALU MELIHAT
ACARA BERITA DI
TELEVISI (SAAT ITU
BARU ADA TVRI)**

menjalani dua kali sekolah plus mengaji. Namun kali ini ditambah dengan organisasi remaja atau yang biasa disebut Halaqah. Kelompok pengajian remaja yang digelar setiap malam Ahad, dimana keesokan harinya sekolah libur. Mereka kerap menyebutnya Halaqah.

Tidak hanya mengaji, dalam kelompok tersebut juga digelar berbagai kajian-kajian Islami. Tidak jarang mereka juga berbagi ilmu tentang cara berdakwah, shalawat, berpidato bahkan membaca puisi. Semua dikemas dengan cara yang cukup santai. Sehingga ia sangat menikmatinya. Belakangan organisasi tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya IPPNU (Ikatan Putra-Putri Nahdhatul Ulama). Tak heran jika organisasi tersebut mendapat pendampingan dari para Kyai setempat. Sehingga bisa dikatakan itulah organisasi pertama yang diikutinya.

Masih diingat Anggia, betapa senangnya ia saat memasuki bulan suci Ramadhan. Pasalnya sekolah diniyah diliburkan. Namun agenda atau acara dalam organisasi remaja tadi malah

meningkat. Bahkan tidak jarang mereka pulang ke rumah hanya ketika mau tidur, sementara sisanya dihabiskan di masjid bersama teman-temannya untuk mengerjakan berbagai hal. Usai sahur, ia kembali lagi ke masjid untuk menunaikan Sholat Shubuh dan kembali berkumpul bersama teman-temanya.

“Selesai Sholat Shubuh, kadang kami langsung ke sungai, main air, bercanda sama teman-teman. Jadi bisa dikatakan saat itu masa-masa paling indah,” akunya.

Masih diingatnya, beberapa kali Sang Kyai mengajak ia dan teman-teman di Halaqah nya ke sebuah acara yang belakangan berkembang menjadi Fathayat. Dengan kata lain, meskipun secara organisasi belum terbentuk, tetapi ia sudah ikut beberapa kali acara fatayat di Kota Sragen.

MENJADI PENERJEMAH

Di SMA, kegiatan Anggia sedikit mulai berkurang. Pasalnya ia sekolah di kota Sragen yang notabene jaraknya cukup jauh dari rumahnya, sehingga sampai di rumah sudah sore hari. Meski begitu, mengaji dan hafalan Al Quran masih terus dilakoninya. Dalam bahasa santri ia masih “Setor Quran”. Singkat cerita masa-masa SMA dilakoninya dengan sewajarnya. Perubahan terjadi ketika ia diterima Kuliah di Universitas Negeri Malang. Ia mengambil pendidikan Bahasa Inggris.

“Pelajaran Bahasa Inggris menjadi pelajaran yang sangat saya benci saat di SMA. Tapi mau tidak mau saya ambil kuliah itu, karena konon pelajaran itu dulu masih sepi peminatnya. Jadi saingan saya untuk masuk kampus negeri pun akan semakin sedikit. Sementara kalau tidak diterima di kampus negeri saya diharuskan bekerja sebagai PNS (saat itu PNS masih menjadi pekerjaan yang tidak diminati-**red**) di Kejaksaan. Karena sebagai seorang pensiunan PNS saat itu ayah saya tidak cukup mampu membiayai perkuliahan di swasta. Sehingga mau tidak mau saya harus berdamai dengan diri saya sendiri, atau berusaha



Anggia saat melakukan aksi penanaman pohon di dapilnya. Foto: dok/mtl

menyukai bahasa Inggris,” papar wanita kelahiran Sragen 25 September 1974 ini.

Akhirnya, Anggia pun ‘terpaksa’ memilih jurusan bahasa Inggris dan ujian masuk perguruan tinggi yang sejatinya juga bukan pilihan utamanya. Dan akhirnya takdir pun mengamini, Anggia memang tidak harus menjadi seorang PNS, namun ia harus mendalami pelajaran yang sama sekali tidak disukainya. Meskipun kemudian dipertengahan perkuliahannya di Universitas Negeri Malang, Anggia mengaku sangat menikmati pelajaran tersebut. Pasalnya, tidak sedikit ilmu atau buku dari bidang ilmu pengetahuan lain yang menggunakan bahasa Inggris. Terlebih lagi, bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa pengantar internasional.

Di sisi lain, saat menjadi mahasiswa, jiwa organisatoris Anggia muncul kembali. Ia tidak hanya aktif di organisasi kampus seperti Senat, namun lebih dari itu, Anggia aktif di organisasi luar kampus. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) salah satunya. Diceritakan Anggia, saat itu dirinya sangat tertarik dengan berbagai isu lokal dan nasional. Sebut saja tentang buruh dan ketenagakerjaan, serta permasalahan perempuan dan anak, disertai kritikan berbagai kebijakan di dalamnya.

“Saya kelihatannya memang lembut

ya, tapi begitu ada di sebuah organisasi dan harus melakukan pendampingan oleh perempuan dan anak-anak, maka saya yang lembut tidak terlihat lagi,” ujarnya.

Bersyukur Anggia memiliki kedua orangtua, khususnya Sang Ibu yang selalu mendukungnya di berbagai kegiatan. Baginya dukungan dan kepercayaan sang Ibu menjadi motivasi tersendiri. Terlebih lagi di masa itu, tak sedikit orangtua di lingkungan tempat tinggalnya yang masih melihat gender dalam memandang segala sesuatunya. Sehingga tidak sedikit anak perempuan yang sejatinya cerdas dan mumpuni diberbagai bidang, namun tak bisa maju karena terhalang stigma bahwa anak perempuan tidak boleh terlalu aktif di luar rumah.

“Kepercayaan dan dukungan dari kedua orangtua saya itu jadi sebuah motivasi tersendiri untuk berbuat lebih baik lagi dan lagi. Di sisi lain, itu juga semakin membuat saya kuat dan tidak gampang menyerah. Itu yang sangat saya syukuri,” aku Anggia.

Saat kuliah menjadi babak tersendiri baginya. Perjuangan hidup dirantau dengan uang kiriman seadanya dari kedua orangtuanya secara tidak langsung membuatnya harus memutar otak agar bisa mendapat uang saku tambahan yang cukup untuk membayar sewa kost, makan sehari-hari dan

berbagai kebutuhan lainnya.

Di semester kedua dan ketika, ia mendatangi rental komputer dekat kampusnya. Kebetulan rental tersebut sedang membutuhkan penerjemah. Akhirnya Anggipun dipercaya untuk ikut menerjemahkan. Dari sana ia pun mendapat uang tambahan untuk sekedar membeli sabun favoritnya. Sementara kiriman dari kedua orangtuanya khusus untuk membayar sewa kost dan makan sehari-hari.

ORGANISASI DAN PARPOL

Singkat cerita, tahun 1998 Anggia berhasil menyelesaikan perkuliahannya. Ia pun pamit kepada kedua orangtuanya hijrah ke Ibu Kota untuk mengadu nasib. Dengan bekal ijazah S-1 plus sertifikat TOEFL yang dimiliki, Anggia hijrah ke Ibukota. Awalnya, ia tinggal di rumah salah seorang kakaknya yang kebetulan sudah lebih dulu hijrah ke Jakarta dan bekerja di salah satu stasiun TV nasional. Oleh salah seorang Pamannya, Anggi diminta untuk tinggal di rumahnya sambil mendapat pekerjaan tetap. Namun di rumah pamannya itu Anggi pun tak bertahan lama. Hingga kemudian ia memutuskan untuk kost di dekat kantor PBNU yang kebetulan ia sudah resmi menjadi kader NU.

“Walau bahasa Inggris saya Pas-pasan tapi kebetulan sekali ketika itu kader NU masih sedikit yang bisa bahasa Inggris. Sehingga saat itu alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh Kyai dan pengurus lainnya. Bahkan tak berapa lama saya diikuti sertakan dalam pertukaran pelajar ke Jepang yang uangnya pun lumayan, dan bisa saya jadikan modal untuk membayar kost selama beberapa bulan,” akunya.

Bahkan istri dari Sultonul Huda ini kemudian berhasil menyelesaikan program pasca sarjannya dengan mengambil jurusan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Berbarengan dengan perkuliahannya tersebut, Anggia yang memang sejak kecil sangat dekat dengan NU pun kemudian didapuk

untuk masuk dalam partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu partai yang berafiliasi dengan NU. Sehingga ia merasa visi dan misi PKB sejalan dengan harapan dan cita-citanya.

Prestasi dan karir politik Anggia di PKB pun tergolong moncer. Ia sempat menjadi sekretaris di Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan NU (PP-LKNU). Anggia pun pernah menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU untuk periode 2015-2020. Bahkan terakhir di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar, Anggia dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekjen PKB. Terakhir ia dipercaya menjadi Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Sumatra Barat periode 2015-2020

Tahun 2014 ia mencoba peruntungan mengikuti pemilihan legislatif. Sayangnya, ia gagal meraih kursi ke Senayan. Dan di tahun 2019 lalu, ia kembali mengikuti pemilihan legislatif di Dapil Jawa Tengah VI meliputi Kota dan Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kediri. Kali ini dewi fortuna mulai mendekatinya. Ia lolos dalam ajang pemilihan yang digelar setiap lima tahun sekali itu. Artinya itu berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi wakil rakyat.

Oleh fraksinya, awalnya Anggia dipercaya untuk duduk di Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan, buruh dan ketenagakerjaan. Linier dengan *background* pendidikan Anggia sebagai seorang Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Namun agaknya, pimpinan Fraksi PKB melihat ada kemampuan terpendam dalam diri Anggia, hingga kemudian dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menggantikan Daniel Johan, rekan separtainya yang lebih dulu dan lebih lama duduk di Komisi IV DPR RI.

DUKUNGAN SUAMI DAN KELUARGA

Berbicara tentang kesuksesan seorang perempuan tak lepas dari restu dan dukungan dari Sang Suami. Hal itu pun sangat disadari Anggia. Sama-sama menjadi aktivis di organisasi

NU dan partai yang sama, PKB tentu memudahkan langkah Anggia untuk terus memantapkan karir politiknya.

“Saya bertemu dan kenal pertama kali dengan suami saat menjadi kader NU. Sehingga tidak ada alasan bagi suami saya untuk melarang saya menjadi aktivis. Bahkan Alhamdulillah suami saya sangat mengerti dan mendukung karir saya,” ungkapnya.

Anggia menilai salah satu sikap pengertian yang cukup tinggi adalah tidak adanya tuntutan dari sang suami untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah, ketika asisten rumah tangganya tidak ada. Anggia dan Suami lebih menganggap rumah tangganya itu sebagai sebuah *team work*. Sehingga keduanya pun berbagi tugas dan pekerjaan rumah tangga. Pasalnya Sang Suami sangat memahami di mana Anggia juga sama dengan dirinya yang sudah lelah menjalankan sederet aktivitasnya di

luar rumah. Begitupun saat keempat putra-putrinya beranjak dewasa. Ada atau pun tiada asisten rumah tangga, mereka berbagi tugas dan pekerjaan rumah.

Dalam hal pola didik, Anggia dan suami memilih mengikuti pola didik yang diterapkan kedua orangtuanya pada Anggia. Agama menjadi hal yang utama, dan memberikan kepercayaan serta dukungan penuh terhadap anak-anaknya untuk berkegiatan dan berorganisasi sesuai dengan *passion* si anak.

“Agama harus jadi yang utama. Dan kami sepakat untuk memberikan kebebasan pada anak-anak untuk berorganisasi dan berkegiatan sesuai keinginan mereka, namun tetap terus dipantau dan diawasi. InsyaAllah dengan agam sebagai pondasi, mereka bisa terhindar dari hal-hal negatif,” pungkas ibu empat orang anak ini. ● ayu/es



Anggia Erma Rini. Foto: Jaka/ivi

Apresiasi Mekanisme Pendidikan di Sesko TNI

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung Sesko TNI di Bandung, dan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU di Rumpin, Bogor. Tak hanya itu, di Pandeglang, Komisi I DPR RI meminta agar akses telekomunikasi tidak hanya fokus di daerah 3T saja.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi mekanisme pendidikan yang dijalankan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, terutama saat pandemi Covid-19 menyerang. Kesiapan terus dilakukan agar proses

pembelajaran tetap berlangsung kepada Perwira Siswa (Pasis), sebagai bentuk pertahanan negara.

Meutya mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Pgs Komandan Sesko TNI beserta jajarannya, di Sekolah Staf dan

Komando TNI, Bandung, Jawa Barat, awal Juni. Meutya ingin ke depannya fasilitas dan kurikulum di Sesko TNI selalu sigap dalam mengikuti kebutuhan dan permintaan di era digital.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, kunjungan ke Sesko TNI ini bertujuan meninjau langsung kesiapan dan strategi yang sudah diterapkan Sesko TNI dalam mendidik Pasis. Ia menilai, mekanisme pendidikan yang dijalankan pun sudah cukup ideal, yakni berbasis pada *Adult Learning System*.

"Kondisi sedang pandemi, Sesko sudah siap melakukan proses belajar secara virtual. Kami mengapresiasi hal ini sebagai bentuk kesiapan Sesko TNI dalam mengikuti perkembangan digital, yang mana proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan prioritas *safety, comfort, efektif, dan efisien*. Hal ini guna menciptakan beban belajar Pasis yang dirancang proporsional, sebagai bentuk menuju *Smart Campus*," tuturnya.

Meutya dapat memahami harapan akan kebutuhan Sesko TNI Bandung itu sendiri. Ia bersama Anggota Komisi

I DPR RI yang hadir, mengupayakan alokasi kebutuhan anggaran yang diajukan pada RKA Tahun Anggaran 2022.

APRESIASI SATBRAVO 90 PHASKAS

Di Bogor Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengapresiasi pemaparan Komandan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU, terkait kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok TNI seperti operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang



Foto bersama tim kunker Ketua Komisi I DPR RI dengan Pgs. Komandan Sesko TNI beserta jajarannya. Foto: Dipa/mv



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU Rumpin, Bogor. Foto: Nadia/mvl

dengan dukungan alutsista dan sarana prasarana yang dimiliki.

Komisi I DPR RI juga mendukung tercapainya program usulan SatBravo 90 Paskhas TNI AU. Di antaranya, target pembangunan sarana dan prasarana, dan pembangunan material sampai dengan tahun 2024. Mengingat kondisi sarana prasarana maupun alutsista yang dimiliki saat ini sudah tidak sesuai dengan zaman, dan diharapkan kebutuhan Indonesia untuk memiliki TNI yang kuat dari 2021-2024 segera dapat teralisasi.

“Kemudian ada juga kebutuhan untuk tempat latihan, kebutuhan alat angkut yang cepat. Jadi ini memang harus didorong kebutuhan mereka. Mudah-mudahan konsep yang kita inginkan, punya TNI yang kuat dari 2021-2024 kebutuhan ini sudah masuk,” papar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU Rumpin, Bogor, Jumat (4/6/2021).

Utut menambahkan, secara konsep keprajuritan dan kesiapan para prajurit yang berada di SatBravo 90 Paskhas TNI AU memiliki kemampuan yang mumpuni, namun dari sisi peralatan dan sarpras yang ada perlu didukung. Utamanya terkait dengan alat penyadap sebagai penunjang kinerja mereka

yang saat ini masih berteknologi 2G sedangkan, kemajuan yang ada saat ini sudah sampai 5G.

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI JANGAN HANYA DI DAERAH 3T

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta agar pembangunan jaringan telekomunikasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

(3T), karena faktanya masih banyak daerah di pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Ia menginginkan agar pemerintah harus turut hadir di setiap wilayah Indonesia.

“Pemerintah harus hadir dengan segala upaya yang dimiliki terkait pembangunan sinyal atau telekomunikasi di daerah-daerah Pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Program merdeka sinyal harus terealisasi di daerah 3T maupun di Pulau Jawa sendiri,” kata Rizki di Kantor Bupati Pandeglang, Banten.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa Pandeglang yang terdiri dari 35 Kecamatan dan hampir 400 desa, memiliki kontur pegunungan dan pesisir, ini merupakan suatu kendala yang membuat kesenjangan akses internet masih terasa di daerah tersebut.

“Masih banyak masyarakatnya yang hidup di desa, di dalam desa lagi. Jadi akses menuju pusat, akses kepada jaringan telekomunikasi sangat sulit sekali didapatkan. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang menerima pembelajaran dari sekolahnya lewat internet. Jaringan internet dan telekomunikasi harus segera terealisasikan di (seluruh) Provinsi Banten,” tutupnya. • ndy,dip,azk/es



Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang. Foto: Azka/mvl

MPP Mudahkan Masyarakat Akses Layanan Publik

Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Pengembangan MPP di setiap daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bertukar cenderamata dengan Bupati Sidoarjo. Foto: Husen/nvl

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai MPP yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur, benar-benar telah memudahkan sekaligus memanjakan masyarakat setempat dalam mengakses layanan publik. Hampir semua bentuk layanan tersedia dalam satu atap. Menurutnya hal ini merupakan sebuah tren terobosan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita telah kunjungi Mall Pelayanan

Publik Sidoarjo. Satu konsep baru yang muncul beberapa tahun ini dan sudah menjamur di setiap kabupaten kota. Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan satu pintu itu. Jadi, bisa selesai dengan cepat dan mudah. Kita juga lihat sistem *Online Single Submission*. Sidoarjo ini termasuk pionir. Walaupun begitu pemerintahnya jangan langsung puas. Masih ada masalah lain,” tutur Doli.

Doli menyatakan, konsep MPP mulai menjamur di beberapa kota dengan memberikan kecepatan dan kemudahan mengakses layanan. Di

MPP berbagai layanan publik tersedia. Misalnya, layanan kependudukan, SIM, imigrasi, izin usaha, pengurusan tilang kendaraan, sampai kejaksaan. Dalam kunjungan kerja tersebut terungkap bahwa persoalan maladministrasi di Jatim cukup tinggi salah satunya banyak terjadi di Surabaya.

Doli mengungkapkan, kasus maladministrasi di Jatim mungkin disebabkan tingkat pemahaman masyarakatnya sudah tinggi terhadap prosedur layanan publik. Selain itu, maladministrasi yang banyak terjadi di Jatim, mungkin juga karena masyarakatnya sudah mengetahui ada lembaga pengaduan seperti Ombudsman tempat mengadukan layanan masyarakat yang merugikan. “Jatim ini termasuk yang tertinggi pengaduan maladministrasi pelayanan publiknya,” tutup politisi Partai Golkar itu.

MPP HARUS TERINTEGRASI

Di provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menekankan pentingnya integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP secara digital dan adaptif terhadap perubahan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama di era globalisasi saat ini yang mengedepankan prinsip keterbukaan (*open government*).

“Kami menilai MPP di Kota Palembang ini dengan 373 jenis pelayanan dari 30 instansi sudah terintegrasi dalam satu atap adalah inovasi yang terbaik. Saya kira patut dikembangkan di wilayah tanah air Indonesia. Karena ini sangat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik,” jelas Syamsurizal.

Namun di sisi lain, dirinya menyoal masih adanya instansi yang mengharuskan masyarakat yang



Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau MPP Kota Palembang. Foto: Tiara/rml

ingin mendapatkan pelayanan publik, untuk tetap datang ke kantor induk meski sudah memperoleh pelayanan di MPP.

“Semestinya yang namanya pelayanan publik itu, tidak lagi kembali ke kantor induk, jadi mesti final di MPP itu. Sekarang kan sudah terintegrasi secara elektronik, jadi seharusnya bisa diselesaikan misalnya melalui pertemuan virtual antara staf yang ada di MPP dengan yang ada di kantor induk,” jelas Syamsurizal.

Untuk itu, ke depan politisi dapil Riau I ini berharap MPP yang berada di daerah lain nantinya bisa mengembangkan konsep elektronik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara efisien dan transparan.

“Karena itu saya berharap pemerintah Kota Palembang untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik baik dari sisi kuantitas maupun

kualitas karena pelayanan publik sangat mempengaruhi sektor-sektor kehidupan,” imbuhnya.

MPP PERMUDAH MASYARAKAT AKSES LAYANAN PUBLIK

Di provinsi Jawa Tengah Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengapresiasi layanan yang ada di MPP Kota Surakarta. Menurutnya MPP tersebut sudah cukup lengkap di antaranya terdapat layanan imigrasi dan polres, yang di tempat lain belum ada.

“Ini merupakan suatu MPP yang menjadi percontohan, ini cukup lengkap. Ini baru ada imigrasi di sini, ada polres, di tempat lain ini belum ada. Tentu ini menjadi masukan bagi kami untuk bicara, supaya menekankan kepada para kepala daerah membuat paling sedikit Surakarta menjadi contoh,” ungkap Junimart.

Komisi II DPR RI melakukan peninjauan MPP Pemerintah Kota Surakarta, guna mengetahui langsung proses layanan yang diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut Junimart meyakini MPP yang ada di Surakarta ini dapat menjadi masukan untuk MPP di provinsi lainnya. “Ini menjadi masukan kota lainnya dan kita apresiasi.” ungkap Junimart usai melakukan peninjauan. ● tra, mh, ran



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meninjau MPP Pemerintah Kota Surakarta. Foto: Rizka/rml

Komisi III Awasi Kinerja Aparat Penegak Hukum di Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, beberapa waktu lalu Komisi III DPR RI secara khusus menyoroti persoalan pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malut), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sumatera Utara (Sumut).

Persoalan pertambangan di Provinsi Malut menimbulkan persoalan hukum yang berakibat pada dampak buruk terhadap iklim perekonomian dan investasi. Permasalahan pertambangan meliputi kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan, tambang ilegal, perizinan yang tidak sesuai peruntukan, hingga persoalan pembukaan lahan dengan pihak penambang, yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan dengan negara maupun masyarakat setempat.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut beserta jajaran dalam rangka pengawasan penegakan hukum terkait sumber daya alam dan permasalahan yang berkembang di masyarakat Ternate, Maluku Utara.

“Hari ini Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke provinsi Malut. Ini merupakan tugas komisi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dalam rencana

strategis Komisi III DPR pada Periode 2019-2024 ini, salah satu hal yang disoroti adalah fungsi dari penegakan hukum dan pengamanan terhadap sektor penerimaan negara di bidang sumber daya alam,” jelas Pangeran.

Politisi Fraksi PAN ini juga menuturkan, Komisi III DPR memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

APRESIASI POLDA KALTIM TANGANI PERMASALAHAN SDA

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi Polda Kaltim atas kinerjanya dalam menghadapi seluruh permasalahan yang ada di Provinsi Kaltim, terkhusus permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan hampir seluruh permasalahan di Polda dan Kejaksaan Tinggi Kaltim dapat diatasi dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang terlalu menonjol.

“Mungkin terkait masalah-masalah kecil SDA, yaitu adanya sedikit sengketa antara pemilik tambang itu juga tanahnya perdata. Jadi saya pikir hampir keseluruhan terkait SDA, Polda Kaltim serta jajarannya dapat mengantisipasi dengan baik,” ungkap Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kaltim dan dan Kajati Kaltim di Mako Polda Kaltim, Balikpapan.

Dalam persiapan menjadi Ibu Kota Negara yang baru, wilayah Kaltim masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya kondisi pertambangan di Kaltim yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat karena tata kelola yang buruk, perizinan yang belum jelas, tumpang tindih, dan minimnya data serta standardisasi lingkungan hidup. Selain itu, adanya kegiatan penambangan ilegal yang mempengaruhi upaya perbaikan lingkungan hidup.

“Dan juga dilaksanakan secara serius



Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut di Ternate. Foto: Tiara/ivi



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin tim kunspek Komisi III di Mako Polda Kaltim. Foto: Hanum/nvl

dan sungguh-sungguh serta mendorong pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bersama-sama tanpa adanya ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum terhadap sektor pertambangan yang ilegal untuk memaksimalkan penerimaan negara” imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.

PEREDARAN NARKOBA HARUS DIPERANGI

Sementara di Sumut, Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Panjaitan menegaskan peredaran narkoba di Sumut dari negara tetangga, harus diperangi. Pasalnya Sumut selalu menjadi peringkat pertama tingginya tingkat kasus narkoba secara nasional.

Hinca menegaskan hal tersebut dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswantanu beserta jajarannya, di aula pertemuan Mapolda Sumut, Medan.

“Karena kita (Sumut) juara satu secara nasional, kadang-kadang dua tiga terus jadi juara satu, sumbernya ini adalah bandar narkoba dari Malaysia dan semua kita tahu itu. Saya mau bilang ini

ganyang bandar narkoba dari Malaysia,” tegas Hinca.

Menurutnya, daerah Asahan yang merupakan tempat kelahirannya merupakan salah satu tempat beredarnya narkoba. Beberapa waktu lalu, Hinca bersama Kapolda Sumut yang sebelumnya, mendapati 57 kg narkoba jenis sabu-sabu dan 5000 butir ekstasi. Hal itu menjadi faktor kenapa Sumut selalu menjadi peringkat satu nasional kasus penyebaran narkoba.

“Pak Pimpinan saya melaporkan mendampingi Pak Kapolda bulan lalu, di kampung saya, Asahan, Polres Asahan, selama ada Asahan, selama saya ada,

biasanya setengah kilo ditangkap, sekali ini ketangkap 57 kg sabu-sabu, 5000 ekstasi, jadi wajar juara satu kita,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Hinca menambahkan, jalur yang biasa dilalui para pengedar narkoba asal Malaysia melalui jalur laut, baik jalur-jalur kecil maupun besar. Oleh karena itu, Hinca meminta kepada Kapolda Sumut mendorong sarana prasarana Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Sumut untuk diperkuat, serta meningkatkan pengawasannya terhadap jalur-jalur yang diperkirakan dilalui oleh para kurir narkoba itu.

“Karena semua masuk dari (wilayah) air. Karena itu, menurut saya polisi air menjadi penting sekali, sekalipun tadi kita sarankan, semua kapal-kapal yang ada di laut kecil dan besar harus ada STNK dan BPKB nya atau plat nomornya supaya mudah dicatat, karena mereka lah yang sebenarnya melakukan transaksi,” kata legislator dapil Sumut III itu.

Hinca berharap dan meyakini Kapolda Sumut yang baru mampu memimpin untuk memberantas para bandar-bandar narkoba besar, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. “Saya yakin Pak Panca mempunyai semangat baru dan lebih kuat untuk mengatasi persoalan penyebaran narkoba di Sumut ini yang sudah sangat memprihatinkan,” tutup Hinca. ● hnm,qq,tra/es



Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Panjaitan dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi III dengan Kapolda Sumatera Utara. Foto: Rizki/nvl

Dukung Anggaran Renovasi Sarpras Politeknik KP

Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau kinerja sejumlah mitra kerjanya di daerah diantaranya Politeknik KP di Karawang, Pemulihan Ekosistem Mangrove di Serang, serta Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Jawa Barat.



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Politeknik KP Karawang. Foto: Jaka/mv

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono mendukung anggaran untuk renovasi sarana dan prasarana Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) di seluruh Indonesia. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar renovasi yang dianggarkan untuk membuat Politeknik KP menjadi destinasi edukasi wisata bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Budi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Politeknik KP Karawang di Jawa Barat, baru-baru ini. Ia mengatakan, masyarakat umum bisa belajar teknik-teknik perikanan, hasil olahan perikanan dan belajar mengenai kekayaan laut Indonesia di Politeknik KP pada Sabtu-Minggu. Sehingga, Politeknik KP yang ada di beberapa daerah ke depannya bisa menjadi ikon daerahnya.

“Saya rasa dua hal tadi adalah rekomendasi besar yang akan kami usulkan nanti pada rapat kerja dengan mitra terkait, sebagai kesimpulan dari Kunspek ini. Dan saya berharap, melalui kunspek ini kita juga bisa mendorong Politeknik KP agar dapat meningkatkan kualitas pelatihan untuk mempersiapkan SDM yang tangguh, bisa berkompetisi di era ini, dan dapat memajukan perikanan dan kelautan kita,” ungkap Budi.

TINJAU PEMULIHAN EKOSISTEM MANGROVE

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Cagar Alam Pulau Dua di Kabupaten Serang serta Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang. Tak hanya meninjau dan melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan setempat, para Anggota Komisi IV yang terlibat dalam kunjungan ini juga melakukan penanaman bibit pohon bakau.

Menurut Anggia kegiatan pemulihan ekosistem penting dilakukan demi menjaga habitat berbagai jenis hewan, termasuk burung migran dan burung lokal yang dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi oleh undang-undang, dalam kaitannya dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

“Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove yang menjadi habitat berbagai jenis burung migran dan jenis lokal yang dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi oleh undang-undang,” papar Anggia di Cagar Alam Pulau Dua, Serang, Provinsi Banten.

Saat berdialog dengan para pemangku kepentingan setempat, para Anggota Komisi IV menyerap informasi mengenai gambaran pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang oleh Balai Pengelolaan Daerah



Tim Kunspek Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Cagar Alam Pulau Dua. Foto: Eko/nvl

Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung.

Anggia juga mengungkapkan, pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove oleh BPDAS selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) dalam kaitannya dengan rencana realokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BRGM untuk kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar 9 Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan BRGM.

SOROTI INSEMINATOR SEMEN BEKU DI BIB LEMBANG

Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengatakan untuk mewujudkan swasembada daging sapi, populasi sapi ternak perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan tenaga inseminator semen beku yang profesional untuk menyiapkan bakalan-bakalan sapi yang akan digemukan kemudian dijadikan sapi potong.

Hal tersebut disampaikan Hanan saat mengikuti tim kunspek Komisi IV DPR RI ke Lembang, Jawa Barat. “Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang

merupakan hulu dari pada industri peternakan. Alhamdulillah balai ini sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional yang sudah terjamin kualitasnya,” ucap Hanan.

Semen beku dari BIB Lembang, sambung Hanan, dapat langsung

disebarkan ke masyarakat. “Di kalangan masyarakat, untuk menangani hal tersebut (semen beku berkualitas) masih memerlukan tenaga inseminator semen beku yang profesional, tentu caranya dengan pelatihan dan penyuluhan untuk mendapatkan inseminator yang kompeten,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan, BIB Lembang yang sudah terakreditasi ini semuanya sudah baik, termasuk juga sarana dan prasarananya. Tentunya semen beku yang dimiliki juga berkualitas baik, sedangkan untuk sampai ke rahim sapi maka perlu manusia yang mengelola semen beku tersebut.

“Makanya saya ingatkan kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) supaya bisa meningkatkan keahlian inseminator dengan cara pelatihan dan ke depannya agar lebih diperhatikan untuk masa yang akan datang. Masalah di lapangan yaitu masalah keterlambatan, masa waktu sapi birahi berdurasi 8 jam artinya jika sudah ada sapi birahi sebelum 8 jam itu sudah harus diinseminasi. Nah itu bagaimana jika inseminatornya tidak ada di tengah lapangan, jadi ini sangat penting,” jelasnya. ● jk,eko,cas/es



Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak saat mengikuti kunspek ke Lembang. Foto: Chasbi/nvl

Komisi V Pantau Pembangunan Infrastruktur

Komisi V DPR RI, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang untuk memberi masukan dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan di tiga daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar pemerintah lebih proaktif menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Jika pembebasan lahan ini belum juga teratasi, target waktu pekerjaan akan mundur yang mengakibatkan konsekuensi anggaran.

Hal ini diungkapkan Andi saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR

RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten. Ia mengatakan bahwasanya masalah pembebasan lahan adalah masalah klasik yang kerap terjadi tidak hanya di Kementerian PUPR saja.

“Saya sudah sering kali sampaikan kepada para mitra kerja Komisi V DPR, agar pembebasan lahan diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik. Karena hal tersebut mengganggu serapan anggaran ataupun jangka waktu pelaksanaan kontrak. Jika terjadi seperti ini, apakah menjadi kesalahan rekanan ataupun

kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri dalam konteks menyelesaikan masalah sosial yang ada di lapangan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, seperti yang telah direncanakan, Tanggul Sungai Ciujung jika sudah selesai kelak dapat mereduksi banjir sebesar 52 persen di wilayah Kabupaten Serang. Sehingga pembangunan tersebut bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.

“Jika kita mengacu pada bencana banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih sekitar 19 ribu keluarga yang terkena dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak ini juga tergenang. Sehingga kita merasa Tanggul Sungai Ciujung ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi kembali,” harap Andi.

TINGKATKAN MUTU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta agar pembangunan jalan tol di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini dapat lebih memperhatikan mutu. Menurutnya, masyarakat hari ini belum benar-benar bisa menikmati jalan tol dengan nyaman dikarenakan banyak fasilitas umum (fasum) dari jalan tol yang tidak berfungsi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR meninjau pembangunan tol Cimanggis-Cibitung di Jawa Barat yang diproyeksikan selesai pada pertengahan tahun 2022. Ia menuturkan, banyaknya jalan bergelombang dan berlubang, serta minimnya fasilitas keamanan semisal CCTV dan pembatas jalan seringkali menimbulkan kecelakaan.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Foto: Jaka/mf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Erlangga/nvl

“Kita harap (pembangunan tol) juga memperhatikan mutu, karena kebanyakan jalan tol di Indonesia ini masih banyak yang tidak memperhatikan mutu. Terutama tingkat gelombang jalan itu sendiri. Maka itu juga menjadi perhatian-perhatian Anggota Komisi V DPR RI. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran Anggota bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” terang Ridwan.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, pembangunan jalan yang saat ini sedang berlangsung harus didesain dengan sangat apik seperti jalan tol JORR yang ia sebut sebagai keberhasilan produk jalan tol. Sedangkan saat ini menurutnya berbeda karena fisik tol tidak sesuai dengan tarif tol yang dibebankan kepada masyarakat. Sehingga harapannya, pemerintah dapat segera memperbaiki fasum untuk kelancaran mobilisasi masyarakat.

APRESIASI PEMBANGUNAN TOD DI RAWA BUNTU

Komisi V DPR RI mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan serta BUMN terkait atas inisiatif penyediaan hunian alternatif selain rumah tapak yakni hunian vertikal berbasis transportasi atau *Transit Oriented Development* (TOD)

yang dibangun Perum Perumnas di kawasan Stasiun Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di lokasi pembangunan Rusun Rawa Buntu Serpong, Banten. “Salah satu keuntungan dengan tinggal di TOD adalah selain mendapatkan hunian yang layak, masyarakat juga akan lebih mudah melakukan mobilisasi dengan menggunakan sarana transportasi seperti kereta api komuter,” ujar Sri Rahayu.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan, dengan memilih tinggal di TOD, masyarakat secara tidak langsung bisa menghemat pengeluaran untuk biaya transportasi. Apalagi ada jaminan dari jadwal sarana transportasi seperti kereta api listrik (KRL), mengingat pelayanan yang ditunjukkan oleh PT KAI kepada masyarakat semakin baik.

“Pembangunan rusun ini tentunya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja di kota-kota besar. Di seluruh Indonesia sendiri, hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu disiapkan sekitar 7 juta hunian,” ungkap Sri Rahayu. • skr,er,jk/es



Tim Kunspek Komisi V di lokasi pembangunan Rusun Rawa Buntu Serpong. Foto: Singgih/nvl

Komisi VI Awasi Kinerja BUMN di Daerah

Komisi VI DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan dengan meninjau langsung kerja-kerja perusahaan pelat merah yang memang merupakan mitra kerjanya. Daerah tujuan kunjungan tersebut meliputi Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.



Foto bersama tim kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT Pelindo II cabang Panjang. Foto: Eman/ivi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, didampingi oleh jajaran Direksi PT Pelindo II cabang Panjang, mengatakan pandemi Covid-19 tidak memberi dampak yang signifikan terhadap aktivitas bongkar-muat di *Indonesia Port Corporation (IPC)*/ Pelabuhan Pelindo cabang Panjang. Di mana, aktivitas bongkar muat di pelabuhan hanya turun sekitar 10 persen saja yang didominasi oleh kegiatan ekspor.

Hekal menilai, merupakan suatu hal yang membanggakan ketika melihat angka ekspor komoditas pertanian

yang melebihi komoditas impor. Namun, kecenderungannya adalah ekonomi masih dinikmati perusahaan-perusahaan besar.

“Tapi apa yang kita gali di sini memang menarik, bahwa ekspor dari sini melebihi impor barang yang masuk. Tadi kalau kita lihat data bongkar-muat, memang bongkarannya lebih banyak. Artinya apa, ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat Lampung masih berbasis komoditas yang dikuasai oleh kecenderungannya perusahaan-perusahaan besar,” ujar Hekal.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta agar PT Pelindo II cabang Panjang juga membantu aktivitas

ekonomi masyarakat, seperti dengan membangkitkan UMKM. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat biaya logistik menjadi murah dengan cara sinergitas dalam melakukan distribusi dan menyeimbangkan keluar-masuknya barang.

“Yang bikin barang mahal ini kan kalau one way traffic, keluarnya kurang datangnya banyak. Itu pasti dibebankan kepada ongkos angkutannya. Itu yang kita dorong juga kepada BUMN sesuai porsinya untuk membantu pengembangan UMKM, supaya bisa menciptakan ekonomi kerakyatan yang bisa menyumbang juga kepada ekspor yang berbasis masyarakat,” urai Hekal.

Dengan adanya keterlibatan BUMN, lanjut Hekal, akan sangat membantu perkembangan ekonomi serta menyeimbangkan pertumbuhan ekonominya Indonesia. “Enggak hanya di komoditas-komoditas besar yang sampai hari ini menjadi andalan dan tulang punggung ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

MENANTI BANK DIGITAL NEGARA

BRI Agroniaga direncanakan akan bertransformasi menjadi Bank Digital andalan negara. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan dukungannya kepada BRI Agroniaga.

Menurut Politisi yang akrab disapa Demer ini, untuk bertahan di masa pandemi ini, perbankan harus melihat perubahan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan aksi-aksi korporasi. Ia menilai, upaya yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk menjaga persaingan bisnis perbankan dengan swasta yang sudah lebih dulu menerapkannya.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam pertemuan dengan direksi PT BRI dan PT BRI Agroniaga.
Foto: Erlangga/nvl

“Kita tahu ada Bank Jago, GOTO juga melakukan aksi korporasi yang positif. Ini jadi tantangan buat kita mempertahankan kemenangan bank *hybrid* kita di-*offline*. Ini (Bank Digital BRI) harus segera di-*launching*. DPR mendukung sekali gagasan yang tentu memberi aura positif bagi perbankan kita,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Saat ini masyarakat memang tengah digandrungi oleh munculnya platform-platform bank digital baru yang sangat sederhana, namun memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Demer mengamini hal tersebut. Ia menilai momentum BRI untuk bertransformasi secara digital melalui BRI Agroniaga masih ada, namun harus satu tujuan, yakni tetap berinovasi pada UMKM.

“Pandemi ini jadi momentum BRI untuk melompat lebih jauh dengan tidak meninggalkan basic dan sejarah berdirinya, yaitu re-orientasi untuk membangun dan membantu pembiayaan bagi ekonomi usaha kecil menengah. Saya kira dengan kecerdasan yang dimiliki para direksi hal itu dapat diwujudkan. Platform ini harus

juga dapat menjadi wadah bagi UMKM,” tandas politisi dapil Bali tersebut.

HOLDING INDUSTRI PERTAHANAN

Sementara itu, usai meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Jawa Timur, Anggota Komisi VI DPR

RI Achmad Baidowi berharap rencana Kementerian BUMN membentuk holding industri pertahanan segera dilaksanakan. Nantinya, holding akan menggabungkan 5 BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, dan PT Len Industri yang ditunjuk sebagai induk perusahaannya.

Pihaknya berharap holding dimulai tahun ini, agar konsolidasi kelimanya berjalan tahun depan. “Jangan lagi kita masih bicara wacana holdingisasi, tapi kluster industri pertahanan ini harusnya tahun depan sudah jelas bentuk konkret dari program fasilitas integrasi itu,” ujar Pria yang karib disapa Awiek ini.

Politisi Fraksi PPP itu menilai, PT PAL sebagai perusahaan pemerintah yang ditugaskan bergerak di industri pertahanan itu, sudah banyak mengambil langkah untuk memperkuat industri maritim bangsa. Untuk itu, dengan semakin terkonsolidasinya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang alutsista atau alpalhankam diharap dapat meningkatkan sektor pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Terus terang saja, alutsista yang kita miliki masih sangat payah dan tertinggal, baik sarprasnya maupun kecanggihan teknologinya,” ucapnya. ● es,er,alw/es



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI usai meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero). Foto: All/nvl

Komisi VII Dorong Industrialisasi Alumina dan Hilirisasi Nikel

Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan rampung dibangun pada 2023. Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembangunan smelter yang akan dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) anak perusahaan BUMN PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk tersebut.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembangunan SGAR senilai 800 juta dollar AS atau setara Rp13 triliun dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan bagi

daerah tersebut dan kepentingan nasional. Selain itu, seluruh potensi tambang beserta nilai tambahnya, sebesar-besarnya dapat dinikmati untuk kepentingan di dalam negeri.

“Bahkan kita sepakat akan kita dorong tidak hanya hilirisasi dalam

produk antara berupa alumina, nanti akan menjadi namanya industrialisasi. Kita ini kan sudah ada kelengkapannya, ada pelabuhan-pelabuhan Mempawah, seperti di Kijing sana. Jadi seluruh infrastruktur nanti akan menjadi sebuah integrasi, yang menjadi semboyan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” jelas Sugeng usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar, pertengahan Juni 2021.

Politisi Partai NasDem itu berharap keberadaan SGAR ini dapat menyerap 800 tenaga kerja lokal atau warga sekitar proyek. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan teknikalitas, tentu dibutuhkan *upgrading* pendidikan dan kemampuan melalui *training-training* (pelatihan) tertentu. “Nanti (perusahaan) dengan pemerintah daerah akan melakukan *training-training* terhadap warga sekitar untuk melakukan pekerjaan. Karena memang harus diakui operasi industri semacam ini ini memerlukan kemampuan yang tinggi juga,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

DORONG PERCEPATAN HILIRISASI NIKEL

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan *support* ini karena bisa menjadi *role model* teknologi yang sangat sederhana dan murah,” kata Bambang usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten.

Bambang mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi *Atmospheric Leaching* sangat



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar. Foto: Sofyan/rvi



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Anne/mvi

ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

OPERASIONAL PLTGU MUARA TAWAR TAK BOLEH TERGANGGU

Sektor kelistrikan merupakan sektor yang strategis di Indonesia, kebutuhan pasokan listrik akan terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan

khususnya pada sistem Jawa-Bali. Latar belakang inilah yang membuat PT PLN (Persero) membangun pembangkit listrik, salah satunya adalah PLTGU Muara Tawar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin ke PT PJB PLTGU Muara Tawar, Komisi VII menemukan kendala operasional yang diakibatkan pembangunan pulau

reklamasi di Bekasi. Alex menegaskan agar operasional PLTGU Muara Tawar jangan sampai terganggu. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Pemda Bekasi ke DPR RI agar bisa mendiskusikan dan mencari solusi bersama dan pemangku kepentingan terkait.

“Ada masalah pembangunan pulau reklamasi di Bekasi, pulau P dan V. Itu akan mengganggu air laut untuk pendinginan, kita akan undang Pemda Bekasi dan juga pihak yang terkait, kita undang ke Senayan,” papar Alex saat memimpin Kunspek Komisi VII ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi. Dalam kesempatan ini, Komisi VII juga meninjau secara langsung operasional PLTGU Muara Tawar dan melihat lebih dekat jaminan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Muara Tawar.

Alex menambahkan, Komisi VII juga menjangkau aspirasi mitra terkait dan mendorong adanya sinergi diantara mitra-mitra tersebut untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam memaksimalkan potensi PLTGU Muara Tawar ini. Di mana, imbuh politisi Fraksi Partai Golkar ini, PLTGU Jawa I Muara Tawar ini merupakan salah satu bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. ● sf,ann,eko/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin kunjungan kerja ke PT PJB PLTGU Muara Tawar. Foto: Eko/mvi

Madrasah Aliyah Harus Ciptakan Generasi Unggul

Komisi VIII DPR RI, pertengahan Juni ini, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat untuk mengawasi sektor pendidikan di Cianjur, dan Tasikmalaya serta progres pembangunan Asrama Haji di Indramayu.

perkembangan teknologi. “Tanpa ada pendidikan yang baik, SDM tidak akan bisa bersaing, justru bisa dikuasai orang lain dan kita hanya akan bisa menjadi buruh di negeri sendiri,” tandasnya.

HARGAI PENGABIAN PARA HONORER

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan, untuk menjadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), harus dilalui dengan berbagai macam tes beserta tahapannya hingga ditetapkan sebagai CPNS. Ia berpandangan, bahwa negara harus menghargai pengabdian honorer yang sudah terbiasa memikul beban kerja di instansi pemerintahan.

“Sekarang langsung masuk, ya okelah dia mampu dalam tes. Tapi kan kita harus menghargai orang-orang yang telah mengabdikan sekian tahun. Jadi negara kita ini harus menghargai jasa, apalagi guru-guru bagaimana mereka bisa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran bangsa ini dengan gaji alakadarnya. sementara tidak ada penghargaan dari pemerintah,” ujar Lisda di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti tenaga honorer yang tidak sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah baru, karena seandainya ada pengangkatan, maka formasinya tidak ada atau tidak sesuai.

“Masuk saja honorer dan yang lebih parah lagi honorernya pun bukan dibidangnya. Akhirnya pada saat pengangkatan, dia pusing sendiri karena bukan di bidangnya dan tidak ada formasi untuk dia. Hal seperti ini terus kita pantau bukan hanya di Tasikmalaya melainkan selIndonesia,” kilah Lisda.



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan guru dan siswa MAN 2 Cianjur. Foto: Fitri/ntv

Perkembangan zaman semakin tak terelakan. Modernisasi di sektor Pendidikan, tak terkecuali di tingkat Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) pun menjadi hal penting agar tidak tertinggal di era digital yang terus melaju sangat pesat. Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyebut MAN harus mampu menjemput peluang peradaban baru.

“Saya kira MAN ini harus sudah mulai berpikir bagaimana menjemput peluang-peluang itu dengan cara membentuk cara berpikir dan mendidik anak-anak untuk menyiapkan SDM yang akan datang,” ujar Bukhori di sela-sela

mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur, Jawa Barat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan pentingnya menyiapkan SDM yang memiliki daya saing melalui pendidikan. Legislator dapil Jawa Tengah I itu pun secara gamblang menyebut ada dua hal yang perlu dikuasai di era digital seperti saat ini. “Yaitu sumber daya manusia, kedua adalah penguasaan *resources*,” imbuhnya.

Bukhori berharap akan masa depan pendidikan madrasah yang lebih baik demi menciptakan generasi yang unggul dan mampu bersaing di tengah



Tim kunspek Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja ke MAN 2 Tasikmalaya. Foto: Mentari/mvl

Pastikan Progres Pembangunan Asrama Haji Indramayu Berjalan Baik

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengapresiasi pelaksanaan pembangunan Asrama Haji di Kabupaten Indramayu masih tetap berlangsung meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda. Di mana, pada tahap I, pembangunan Asrama Haji ini menghabiskan biaya sebesar Rp75 miliar dan saat ini sudah memasuki pembangunan tahap dua,

“Asrama Haji itu ditargetkan bisa digunakan untuk pemberangkatan haji melalui Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka pada 2022 mendatang. Pembangunan tahap satu Asrama Haji di Kabupaten Indramayu menelan anggaran Rp 75 miliar,” ujar Ina saat memimpin tim kunspek Komisi VIII DPR RI di Indramayu, Jawa Barat.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Asrama Haji Indramayu memiliki desain yang serupa dengan beberapa tempat di tanah suci. Hal tersebut agar dapat menjadi tempat belajar dan pengobat rindu bagi masyarakat yang belum kesampaian menunaikan ibadah haji. Tak hanya

itu, kelaknnya Asrama Haji ini dapat dijadikan salah satu destinasi wisata religi di Jawa Barat.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Jefry Romdonny

meminta kepada pengampu kebijakan yaitu Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Adib agar pengelolaan Asrama Haji Indramayu harus profesional. Apalagi konsep pembangunan asrama sudah bagus.

Pengelolaan harus profesional, jangan konvensional. Asrama haji Indramayu harus menjadi pusat kegiatan umat. Bukan hanya sibuk saat ritual tahunan haji saja. Namun harus menjadi pusat pendidikan, sosial dan ekonomi,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Adib menjelaskan, pembangunan Asrama Haji pada tahap II ini mengalami beberapa kendala diantaranya belum adanya pagar pengaman area Asrama Haji, tidak sesuai rencana kebutuhan anggaran dengan realisasi anggaran, tidak adanya anggaran pengelolaan dan pemeliharaan dan belum adanya air baku yang tersedia. ● srw,mri,man/es



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau Asrama Haji Indramayu. Foto: Andri/mvl

Pemerintah Harus Lebih Cermat Terima TKA

Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menimbulkan kekhawatiran sendiri. Tak hanya terhadap penularan Covid-19, kedatangan TKA tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal.

Provinsi Sulawesi Utara telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai pintu transit TKA yang akan bekerja di Morowali dan Maluku Utara.

Sebanyak 7000 TKA yang bisa transit dan masuk melalui Sulut, dimana dari jumlah tersebut, beberapa orang TKA yang tinggal dan bekerja di daerah Nyiur Melambai.

Kedatangan para TKA tersebut dikhawatirkan akan menularkan Covid-19 kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, kedatangan TKA juga akan berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal dan jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal.

“Kedatangan TKA ini harus kita konfirmasi dan klarifikasi, terutama bagaimana upaya Pemda dalam penanganan Covid-19 terhadap TKA tersebut. Kemudian mengenai kesejahteraan tenaga kerja lokal juga menjadi fokus kami,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtunewe di Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, baru-baru ini.

Politisi NasDem ini mengatakan, kebijakan masuknya TKA perlu dijadikan perhatian penting. Pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dan bijak untuk menjaga keseimbangan tenaga kerja lokal dan asing.

“Informasinya TKA yang masuk itu kan dalam jumlah yang banyak ini harus dijadikan perhatian jangan sampai nanti pekerja lokal atau daerah malah tergerus

“Kita juga mengkritisi agar yang sudah kita perjuangkan ini dapat diartikan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat banyak, sehingga kualifikasi (untuk TKA) ini bagus sekali untuk kita bisa cari solusi bersama, serta bisa kita tarik keputusan bersama,” ucap Melki saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Bupati Morowali, di Sulawesi Tengah.

Melki menyampaikan, diperlukan kualifikasi yang ketat oleh pemerintah saat mendatangkan TKA ke Indonesia. Kehadiran TKA memberikan tekanan yang kuat bagi masyarakat lokal. Oleh



Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Sulut. Foto: Taufan/rvi

dengan kehadiran TKA ini, intinya Pemerintah daerah harus lebih cermat dan bijak jangan sampai kecolongan,” sebut Felly.

PERLU KUALIFIKASI KETAT SAAT DATANGKAN TKA

Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kehadiran TKA di Morowali, Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap kehadiran tim kunspek Komisi IX bisa memecahkan dan menemukan solusi terbaik terkait TKA. Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti kasus TKA di Morowali ini.

karena itu, Melki menekankan agar masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait bentuk kualifikasi dan ketentuan TKA yang masuk ke Indonesia.

“Kehadiran TKA memang diperlukan beberapa kualifikasi yang kuat, supaya bisa bekerja secara legal di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu berikan sosialisasi kepada masyarakat, memang prioritas tetap tenaga kerja lokal, namun hal ini baik dilakukan, sehingga tidak terjadi salah persepsi saat proses kualifikasi tenaga kerja dilakukan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Melki berharap agar penanganan TKA di Indonesia, harus diperketat



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat pertemuan kunspek Komisi IX DPR RI dengan Bupati Morowali. Foto: Dipa/nvl

dengan regulasi yang tepat. “Kita terus mengungkapkan agar penanganan ketenagakerjaan di tanah air, khususnya isu TKA ini, terus mengikuti regulasi dan semakin sempurna pola yang diberlakukan, sehingga kita berharap cara ini bisa menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan tercipta lapangan kerja yang baik,” tutup Melki.

“Tadi ada juga teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI yang bilang bahwa ini adalah kejahatan korporasi, ini adalah kejahatan besar yang harus cepat kita tanggulangi,” ungkap Ansory kepada **Parlementaria** saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menggali informasi penyalahgunaan rapid test

antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara.

Politisi Fraksi PKS ini juga meminta agar kasus ini ditangani secara tegas. Ia mendorong pemerintah mencabut izin penyelenggaraan tes cepat Covid-19 di Bandara Internasional Kualanamu dan Laboratorium Kimia Farma Diagnostik yang ada di Jalan R.A. Kartini Medan. “Tadi kita sudah mengintruksikan juga bahwa izin lab yang ada di Jalan Kartini harus segera dicabut,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ansory, Komisi IX meminta jawaban secara tertulis dan terperinci dari masing-masing *stakeholder* yang diundang seperti Kadis Kesehatan Sumut, PT Kimia Farma Sumut, KKP Kemenkes Sumut, Badan Otorita Bandara Kualanamu dan lainnya.

“Kalau jawaban-jawaban yang kita undang tadi kurang memuaskan, maka kita akan panggil Gubernur Sumut, Pangdam dan Kapolda Sumut ke Komisi IX DPR RI untuk mendalami lagi kasus ini. Agar jangan sampai terjadi lagi di negara kita, apalagi ini kan bandara internasional. Ini adalah sesuatu yang serius yang harus kita tangani dan tidak boleh lengah dengan kejadian ini,” pungkasnya. ● tn,dip,es/es

TINDAK TEGAS RAPID TEST ANTIGEN DAUR ULANG

Selama pandemi Covid-19, rapid test antigen dan RT-PCR digunakan sebagai syarat administrasi utama bagi sebagian besar moda transportasi. Namun, pada akhir April 2021, publik dikejutkan dengan praktik jasa daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menegaskan kasus penggunaan alat kesehatan rapid test antigen daur ulang oleh oknum eks pegawai PT Kimia Farma Diagnostik merupakan sebuah kejahatan korporasi, dan tidak bisa ditolerir. Ia meminta kasus ini ditangani dengan cepat, tepat dan tegas agar tidak terulang di kemudian hari.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat kunspek mengenai penyalahgunaan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu. Foto: Eman/nvl

Komisi X Dukung Pengembangan Sektor Wisata

Indonesia kaya akan destinasi wisata juga budaya. Komisi X DPR RI menginginkan agar sektor pariwisata di Indonesia mampu menggaet wisatawan baik itu domestik maupun wisatawan internasional sehingga dapat juga menunjang kesejahteraan masyarakat.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Tim Kunspek Komisi X ke Dieng. Foto: Mentari/vivl

Di destinasi wisata Dieng, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti berharap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menggaungkan kembali Dieng menjadi salah satu destinasi wisata internasional yang wajib dikunjungi.

Ia berharap pembangunan destinasi wisata Dieng ditunjang dengan pelebaran akses jalan yang memadai yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Orang kalau mau datang ke sini pertanyaannya pertama jalannya

sudah lebar belum. Usut punya usut, ini jalan punya provinsi jadi kabupaten maupun pemerintah pusat tidak bisa bangun. Mudah-mudahan temen-temen Pemprov yang tadi kita undang dapat menyampaikan agar segera dimulai sedikit demi sedikit, setahun demi tahun dilebarkan aksesnya. Jadi wisatawanannya akan lebih banyak yang datang,” terang Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menambahkan Kawasan Wisata Dieng saat ini sudah semakin baik dari sisi penampilan, pelayanan, kebersihan, maupun kerapian. Para wisatawan pun

dapat menikmati wisata paralayang, pendakian gunung, serta terdapat *home stay* yang menjadi penunjang ekonomi warga sekitar Dieng.

Karena itu, ia meminta keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menunjang objek wisata prioritas internasional ini agar berkembang lebih baik. Hal itu karena, menurutnya, upaya pemerintah kabupaten sudah maksimal. “Kalau tidak ada sentuhan dari provinsi dan pemerintah pusat, Dieng tidak akan berkembang seperti yang diharapkan menjadi menyangga destinasi superprioritas,” tutupnya.

TANJUNG LESUNG PERLU PERHATIAN

Di Pandeglang, Komisi X DPR RI mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pasalnya, objek wisata di Kabupaten Pandeglang tersebut, tidak lagi menjadi sepuluh destinasi wisata prioritas atau kerap disebut ‘Bali Baru’.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap pendekatan prioritas strategi pembangunan wisata tidak dalam jumlah yang terbatas. Melainkan, beri perhatian kepada semua destinasi prioritas per wilayah.

“Berikan kesempatan Berikan kesempatan kepada daerah untuk mempersiapkan destinasi unggulannya. Sehingga, bisa jadi ada 100 destinasi yang baru dan mendapat perhatian, sampai ke level desa wisata. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan strategi, termasuk untuk Tanjung Lesung, untuk Provinsi Banten ini jelas prioritas,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Diketahui, destinasi wisata Tanjung Lesung ini dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya, seperti Kawasan Tua

Banten, Budaya Badui, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Meskipun demikian, destinasi ini pernah mendapat musibah berupa tsunami pada tahun 2019.

“Jadi, dalam catatan dalam kunjungan ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi lebih sinergis. Tidak hanya oleh Kemenparekraf saja, tapi juga Kementerian PUPR, Kemenhub, bahkan juga BNPB. Karena di sini salah satu daerah yang potensi tsunami, maka harus ada satu sentuhan rasa aman bagi pengunjung, salah satunya ada tempat dan jalur evakuasi,” tambah Hetifah.



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI berfoto bersama usai ke destinasi wisata Tanjung Lesung. Foto: Ridwan/mvl

DORONG PENGEMBANGAN SDM DESA WISATA BANYUWANGI

Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Wisata Banyuwangi, Jawa Timur. Pengembangan SDM tersebut meliputi pelaku wisata maupun warga desa. Tidak hanya itu, perlu juga membangun

sistem digital untuk UMKM yang ada di desa tersebut.

Ia melanjutkan, kehadiran Komisi X DPR RI ke Banyuwangi ini untuk menggali pengembangan desa wisata di Indonesia. Selama di Banyuwangi, Tim Kunspek Komisi X mengunjungi Desa Kamiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, sekaligus menggelar dialog dengan para pelaku wisata.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Desa Kamiren di Banyuwangi merupakan desa wisata yang dihuni oleh suku asli Banyuwangi secara mayoritas, yaitu Suku Osing. Desan Kamiren masih menjaga otensitas lokalnya, mulai dari bangunan rumah tradisional hingga tradisi budaya yang tetap terjaga.

“Masukan-masukan dari pelaku wisata ini nantinya akan menjadi bekal kami saat rapat kerja dengan Kemenparekraf. Program apa yang efektif dan terukur untuk pengembangan desa wisata nantinya. Masukan ini nantinya bisa menjadi *benchmark* bagi pengembangan desa wisata di tingkat nasional,” imbuhnya. ● eno,rdn,mri

Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi. Foto: Eno/mvl

Komisi XI Tinjau Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM di Daerah

Komisi XI DPR RI, pertengahan Juni ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah untuk memastikan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan sektor UMKM benar-benar berjalan dengan baik.

Berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian, termasuk di dalamnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menjadi *concern* bersama, khususnya Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengungkapkan, dukungan kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi di Kepri salah satunya melalui pengembangan KEK. “Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus maupun Batam sebagai *Free Trade Zone* diharapkan ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” papar Dito saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja terkait di Batam, Kepri.

Batam merupakan kawasan FTZ yang disiapkan menjadi pintu utama lalu lintas barang dan pelayaran internasional untuk menjadi pelabuhan bebas. Daerah ini pun bercita-cita menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik.

Dito mengungkapkan pada kunjungan ini, Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan penjelasan baik dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/

Bappenas, Pemerintah Provinsi Kepri, maupun Pemerintah Kota Batam mengenai strategi peningkatan ekonomi di kawasan.

“Kami berharap dalam pertemuan hari ini dapat disampaikan mengenai progres dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Di Kepri juga terdapat KEK Galang Batang yang terdapat di Bintan. Pada Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat progres dan pengembangan KEK di Kepri tersebut, sehingga dapat menopang pencapaian

target-target ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

PEMERINTAH PERLU GENJOT DAYA SAING UMKM

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi dengan menggalakkan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi menggenjot sektor UMKM agar lebih mandiri, berdaya saing dan bisa naik kelas.

“Pusat Logistik Berikat merupakan gudang multifungsi untuk menimbun barang impor lokal dengan fasilitas perpajakan, multifungsi ini dimaksudkan untuk menekan biaya dan transportasi logistik yang juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik,” ungkap



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai Jawa Timur beserta jajaran di Surabaya. Foto: Arief/mvl



Foto bersama tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemda Kaltim di Samarinda. Foto: Ria/nvl

Fathan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan, Himbara, dan LPEI, di Surabaya, Jatim.

Politisi PKB itu menjelaskan, berdasarkan informasi terkait pengembangan ekspor Indonesia, ternyata UMKM belum memanfaatkan fasilitas dari PLB yang disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi beberapa industri kerajinan seperti di Tulungagung dan Malang sudah memanfaatkan beberapa skema dari fasilitasi kepabeanan.

“Himbara telah memberikan dukungan penuh kepada pendanaan UMKM. Kita tahu pertumbuhan ekonomi nasional Jatim cukup signifikan, pertumbuhan ekonomi logistik makanan, minuman kerajinan tangan serta industri pengolahan makanan sangat sentral untuk JaTIM. Jadi kita berkesimpulan bahwa kolaborasi dan sinergi diperlukan antara Bea Cukai OJK, BI agar sektor UMKM menjadi UMKM yang kredibel dan mendunia,” dorong legislator dapil Jawa Tengah II itu.

PEMDA HARUS BANTU PENGEMBANGAN UMKM EKSPOR

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI), akses pembiayaan UMKM ke perbankan masih minim. 77 persen pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri serta sisanya 23 persen dari pihak lain termasuk perbankan. Selain itu, mayoritas UMKM juga masih mengalami keterbatasan sehingga mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan.

“Mengingat banyaknya kendala UMKM, maka diperlukan inovasi strategi pengembangan UMKM agar UMKM mampu naik kelas sampai ke level digital dan ekspor,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemda Kaltim yang turut dihadiri oleh *stakeholder* bidang ekonomi dan keuangan, di Samarinda, Kaltim.

Dolfie menerangkan, kondisi pasar global saat ini mulai meningkat. Momen ini harus dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi melalui UMKM. Untuk itu, pendampingan agar UMKM berorientasi

ekspor perlu terus digenjut dengan pelibatan Pusat Logistik Berikat (PLB) Kalimantan Timur serta Pemda Kaltim, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

“Walaupun berada dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan banyak melakukan intervensi. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana kebijakan ini berjalan di lapangan, apakah sudah bisa mengangkat UMKM yang berorientasi ekspor,” jelasnya

Melalui sinergi yang mumpuni, Dolfie berharap nantinya dapat memberikan dukungan sepenuhnya kepada UMKM agar mampu melakukan ekspor atas produk unggulannya. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur lebih meningkatkan ke depannya. “Untuk itu, sensitivitas pemda juga diperlukan untuk meningkatkan UMKM, kebijakan sudah ada pemerintah daerah harus jemput bola kembangan UMKM yang berorientasi ekspor,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. ● eko, afr, rnm/es

Semangat DPR Pulangkan 7.300 PMIB

Negara kembali mendapat tantangan ketika mendapat kabar bahwa Pemerintah Malaysia akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) pada bulan Juni 2021. Yang menjadi masalah adalah dalam masa itu Malaysia akan melakukan *lockdown* ketat yang berpotensi mempersulit kepulangan PMIB.

banyak. Sehingga apapun kondisi pahlawan-pahlawan devisa ini, ia meminta pemerintah dapat memberikan perlindungan optimal kepada mereka. Baginya, kolaborasi seluruh *stakeholder* mutlak diperlukan agar penanganan PMI bisa optimal, terutama bagi kelompok rentan, yakni orang tua, perempuan, anak-anak, dan mereka yang sakit.

“Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan APD terkait proses, pembiayaan bagi mereka yang sakit, harus dikonsolidasikan dan dikordinasikan

SAYA KIRA RENCANA
KEPULANGAN 7.300 PMI
HARUS DIANTISIPASI
DENGAN BAIK.

Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Jaka/ivi



antar seluruh *stakeholder*,” imbuh politisi PKB ini.

Lebih lanjut Gus Muhaimin menekankan, yang terpenting dalam menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI,



Dalam hal ini, DPR RI telah meminta agar proses repatriasi ini dilakukan secara bertahap selama bulan Juni-Juli 2021 dengan mengutamakan orang yang rentan terlebih dahulu seperti ibu hamil, orang lanjut usia, anak-anak, dan orang sakit. Lewat Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI), DPR RI mendorong kolaborasi sektoral antar kementerian dan lembaga dalam

proses pemulangan.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar para pekerja migran tersebut mendapat perlindungan secara optimal. Menurut Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya yang diterima *Parlementaria*, awal Juni lalu, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang matang terhadap rencana kepulangan PMI.

Menurut Gus Muhaimin, 7.300 PMI merupakan jumlah yang sangat

kemudian yang tak kalah pentingnya berkoordinasi dengan pemda daerah asal PMI.

Ia menegaskan, langkah-langkah kerja konkret dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI harus dilakukan, mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan paska mereka sampai daerah tujuan.

“Prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, harus dikoordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan melalui program-program inkubasi bisnis,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Timwas PPMI DPR RI dengan 11 Kementerian/Lembaga di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu, telah diambil kesimpulan yang salah satunya harus dilakukan pengklarifikasian ulang dengan Pemerintah Malaysia mengenai jumlah dan pendataan *by name by address* pada PMI yang akan dipulangkan pada Bulan Juni-Juli 2021.

Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan pemulangan PMIB tersebut agar dapat sampai ke rumah dengan selamat. Selain itu juga bersifat mengklasifikasi para PMIB mengenai daerah-daerah pemulangan agar pemerintah dapat mempersiapkan lewat berbagai sektor transportasi, tidak hanya lewat Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, saja.

Timwas PPMI pun dengan jelas merekomendasikan kepada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuka jalur kedatangan baru, baik melalui jalur laut maupun jalur udara untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur kedatangan yang sudah ada. Selain itu juga meminta data PMI *by name by address* bisa segera dilengkapi sebelum kepulangan.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK perlu mengklarifikasi kembali jumlah PMI dan data *by name by address* yg akan dipulangkan pada bulan Juni- Juli 2021 kepada pihak Pemerintah Malaysia. Timwas PPMI meminta agar kementerian/lembaga melakukan koordinasi untuk mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia tersebut,” terang Anggota Timwas PPMI DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Kemudian, ditambahkan Ninik, sapaan akrab politisi PKB itu, demi mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Timwas PPMI juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal PMI untuk menyiapkan sejumlah fasilitas. “Agar masing-masing pemda dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI,” jelasnya.

TENTUKAN LEADING SECTOR

Sementara itu, Anggota Timwas PPMI DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus menjadi *leading sector* dalam upaya pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia. Menurutnya, UU telah memberikan ‘trah’ tersebut kepada BP2MI. Ia berharap ada informasi berkualitas yang bisa diberikan BP2MI karena seluruh keluarga 7.300 PMI membutuhkan kabar-kabar terbaru terkait pemulangan tersebut.

“*Positioning* dari BP2MI ini menjadi tidak *clear* ketika ada kasus-kasus

seperti ini. Harusnya dalam kasus ini, BP2MI menjadi jenderal lah. Harus banyak statement untuk menunjukkan wibawa negara, sehingga bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Karena itu harus ada juru bicara yang andal untuk mengangkat harkat kita kepada rakyat,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Dengan adanya *leading sector*, menurut Edy tentu secara strategi, pemulangan 7.300 PMI akan lebih cepat dilakukan dan lebih terstruktur, sehingga Kemenko PMK dinilainya perlu segera menunjuknya. Selain itu, karena ia menganggap urgensinya sangat genting, maka ia meminta Presiden Jokowi ikut turun tangan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia.

“Tetapi bahwa kita harus melihat persoalan ini lebih kompleks, maka Presiden Jokowi saya nilai harus ikut berkomunikasi dengan perdana menteri. Menko harus aktif, Menlu harus mengeluarkan lobi-lobi diplomatik kepada Malaysia. Laporan kepada BP2MI banyak kekerasan, banyak perampasan, bahkan sudah menyangkut pelecehan negara. ini yang saya khawatirkan tidak boleh terjadi,” jelas legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Atensi DPR RI terhadap permasalahan ini menciptakan semangat baru dalam mensejahterakan para pejuang devisa Indonesia. Untuk itu DPR RI berharap agar pemulangan tersebut tidak mendapat hambatan berarti sekalipun Malaysia dalam kondisi *lockdown* saat ini. ● er/sf



PRESIDEN JOKOWI SAYA NILAI HARUS IKUT BERKOMUNIKASI DENGAN PERDANA MENTERI. MENKO HARUS AKTIF, MENLU HARUS MENGELUARKAN LOBI-LOBI DIPLOMATIK

Anggota Timwas PPMI Edy Wuryanto.
Foto: Azka/mv

Parlemen Indonesia Tolak Transformasi AIPA



Delegasi BKSAP DPR RI saat pertemuan Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat. Foto: Husen/nvl

Sekretariat ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) diusulkan untuk ditransformasi. Diskursus transformasi diperdebatkan parlemen negara-negara anggotanya. Ada apa dengan transformasi Sekretariat AIPA? Delegasi parlemen Indonesia menolak usulan transformasi.

Apa saja usulan transformasi itu? Awal Juni lalu, AIPA menggelar *Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat*. Dalam pertemuan yang digelar virtual itu, transformasi

mengagendakan pembicaraan soal kenaikan iuran Anggota AIPA, penambahan staf Sekretariat AIPA, dan sekaligus kenaikan gajinya. Parlemen Vietnam yang kini sedang menduduki Sekjen AIPA gencar mendukung semua usulan transformasi tersebut.

Pertemuan virtual yang membincang transformasi Sekretariat AIPA itu dihadiri semua parlemen ASEAN, kecuali Myanmar yang hanya mendengarkan saja, karena belum memiliki parlemen menyusul krisis politik di negaranya. Usulan Vietnam untuk mentransformasi Sekretariat AIPA didukung Thailand. Sementara mayoritas anggota AIPA menolak termasuk Indonesia.

Ketua Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, menjelaskan, Indonesia dalam posisi menolak, lantaran saat ini bukan waktu yang tepat mentransformasi Sekretariat AIPA

ketika semua negara ASEAN, bahkan dunia sedang melakukan penghematan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penolakan Indonesia didukung beberapa negara anggota lainnya.

“Ada usulan transformasi Sekretariat AIPA. Mereka berharap ada transformasi yang fokus pada dua hal, yaitu peningkatan iuran kontribusi anggota AIPA. Per tahun per anggota 30 ribu dollar AS dan *special fund*-nya 5000 dollar AS. Jadi totalnya per negara 35 ribu USD. Ada keinginan juga menambah jumlah staf. Sekarang jumlahnya 15 orang. Jangka pendek diusulkan menjadi 21 orang dan jangka panjang 40 orang,” urai Putu.

Disampaikan legislator dapil Bali ini, banyak negara sedang kesulitan keuangan akibat pandemi. Usulan transformasi Sekretariat AIPA idealnya diwujudkan saat semua negara anggotanya telah memasuki masa kenormalan baru. Usulan transformasi tersebut datang dari parlemen Vietnam yang kebetulan sedang menduduki Sekjen AIPA. Usulan Vietnam didukung Thailand. Namun, mayoritas anggota AIPA berpandangan sama dengan Indonesia.

“Banyak negara ekonominya turun ke jurang yang dalam. Sikap parlemen Indonesia jelas, ingin semua itu ditunda, karena tidak tepat dalam kondisi serba prihatin sekarang. Usulan perubahan ditunda sampai situasi normal kembali di masa yang akan datang. Banyak anggota AIPA yang berpandangan sama dengan Indonesia. Posisi kita jelas, ingin berempati pada semua pihak. Tidak tepat saat ini meningkatkan iuran dan penambahan jumlah staf,” terang Anggota Komisi VI DPR itu.

Dalam pertemuan virtual itu, Putu didampingi dua anggota BKSAP lainnya, Puteri Anetta Komarudin dan Nazaruddin Dek Gam. Bertempat di Tangerang Selatan, Banten, delegasi Indonesia tetap konsisten pada pendirian dan pandangannya bahwa tidak menyetujui transformasi dilakukan

sekarang. Politisi Partai Demokrat ini, menyerukan agar anggaran Sekretariat AIPA dikelola dengan efisien dan efektif.

“Yang harus dilakukan, dana yang ada sekarang harus dikelola secara baik dan efisien. Stafnya diberi tugas komprehensif. Tidak perlu menjadi tim besar, tapi tim kerja yang solid. Kecil tapi solid di Sekretariat AIPA untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan,” harapnya.

Senada dengan Putu, Puteri Anetta Komarudin juga berpandangan sama. Kepada **Parlementaria** usai pertemuan, ia menyatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, transformasi itu belum dibutuhkan.

“Delegasi Indonesia merasa, di saat pandemi seperti ini semua negara ASEAN sedang bertempur melawan Covid-19. ASEAN paling terdampak pandemi, baik ekonomi dan kesehatan. Sebuah langkah yang tidak tepat apabila ingin mengajukan peningkatan kontribusi setiap negara demi kelangsungan AIPA,” ungkap Puteri. Apalagi, AIPA selama ini belum memberi performa maksimal bagi Indonesia.

Untuk menyetujui usulan transformasi Sekretariat AIPA, lanjut politisi Partai Golkar itu, perlu perbaikan performa sekaligus evaluasi dulu, sampai kemudian AIPA bisa meyakinkan negara-negara anggotanya untuk ditransformasi. Diskursus transformasi Sekretariat AIPA ini muncul setelah Vietnam mengusulkan adanya perubahan berupa peningkatan iuran kontribusi negara-negara anggotanya, kenaikan gaji pegawainya, dan lain-lain. Usulan Vietnam itu sekali lagi didukung Thailand.

Namun, ungkap Puteri, mayoritas negara anggota AIPA menolak usulan Vietnam, karena negara-negara ASEAN sedang melakukan penghematan anggaran untuk memerangi pandemi Covid-19. “Kita sudah sepandangan dengan mayoritas anggota, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Laos. Ada juga negara yang setuju dengan usulan

Sekretariat AIPA, yaitu Vietnam dan Thailand. Mungkin karena mereka serumpun. Kebetulan Sekjen AIPA berasal dari Vietnam. Jadi, mereka setuju transformasi Sekretariat AIPA dilakukan,” tutup Puteri. • mh/es

DELEGASI INDONESIA TETAP KONSISTEN PADA PENDIRIAN DAN PANDANGANNYA BAHWA TIDAK MENYETUJUI TRANSFORMASI DILAKUKAN SEKARANG

Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta. Foto: Husen/mv





DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



Gilang Dhiela Fararez: Salurkan Alat Tes Covid-19 Genose



Anggota DPR RI Gilang Dhiela Fararez memberikan bantuan alat tes Covid – 19 dan GeNose. Foto: Ist/mtv

Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius. Disiplin protokol kesehatan, vaksinasi hingga angka testing Covid-19 menjadi salah satu strategi pengendalian pandemi di Indonesia.

Anggota DPR RI Gilang Dhiela Fararez memberikan bantuan alat kesehatan berupa alat tes Covid-19, GeNose. Bantuan diserahkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, baru-baru ini.

“Saat ini Demak dan Kudus menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Semoga segala bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Jepara, Demak, Kudus,”

ujar Politisi PDI -Perjuangan dapil Jawa Tengah II ini, baru-baru ini.

Selain pemberian bantuan GeNose, diserahkan juga bantuan CSR senilai dari PT Semen Indonesia berupa sarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana kesehatan dari PT Semen Indonesia untuk wilayah Jepara, Demak, Kudus.

Terkait meningkatnya tren kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, Gilang meminta tim medis waspada dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengenakan alat pelindung diri (APD)

yang sesuai dengan standar saat menangani pasien Covid-19.

Ia juga mengapresiasi atas semangat dan kerja keras tim medis yang sejak awal pandemi berjibaku menjadi garda terdepan. Namun, tim medis saja tidak cukup untuk melawan Pandemi Covid-19.

Karenanya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan terus menerapkan 5M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas.

“Pemutusan virus ini dapat dicegah dengan menerapkan kedisiplinan yang dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan keluarga, mari kita saling mengingatkan dan saling menguatkan,” imbuhnya. ● ann/es

Dedi Mulyadi:

Petani Milenial Jangan Terpaku Dengan Sawah

Keberadaan petani milenial kini menjadi profesi baru yang mulai digemari para pemuda di Indonesia. Di tengah lahan pertanian yang semakin kecil, petani milenial harus bisa terus berinovasi agar tetap produktif terlebih di masa pandemi Covid-19.



Anggota DPR RI Dedi Mulyadi usai memberikan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap para petani milenial. Foto: Ist/nvl

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPR RI Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam pelatihan dan bimbingan teknis terhadap para petani milenial bersama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Tajug Gede Purwakarta. Menurutnya, petani kini bisa memanfaatkan lahan terbatas sebagai media tanam menggunakan jenis bibit khusus. Contohnya padi gogo yang bisa ditanam menggunakan pot di mana saja dan kapan saja.

“Menjadi petani itu jangan terpaku dengan sawah. Sekarang sawah sudah habis jadi perumahan dan pabrik,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menilai, petani kini bisa memanfaatkan lahan terbatas sebagai media tanam menggunakan jenis bibit khusus. Contohnya padi gogo yang bisa ditanam menggunakan pot di mana saja dan kapan saja.

Kedepannya, politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Pangan dan Pertanian memberi contoh kepada masyarakat memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman produktif seperti padi gogo. Ia menyebut padi atau beras merupakan sebuah harga diri bagi masyarakat Sunda. Sehingga para petani selalu memakan manajemen hati bukah hitungan bisnis

dalam mengelola sawahnya.

“Sekarang dinas pertanian saja beras masih beli, harusnya kasih contoh jangan hanya mengajari saja. Coba sekarang itu hitung setiap bangunan pemerintah ada berapa lahan kosong, tanami padi gogo, saya yakin kita tidak perlu lagi beli beras apalagi impor,” kata legislator dapil Jawa Barat VII ini.

Di tempat yang sama Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Fajri Jupri mengatakan pelatihan dan bimbingan teknis tersebut diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi petani milenial sekaligus mensosialisasikan teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian.

Dalam bimbingan teknis bertema Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Penyuluh kali ini, para petani milenial dijamin untuk penggunaan alat tanam benih langsung (ATABELA). Teknologi ATABELA merupakan salah satu komponen teknologi LARGO SUPER yang pernah diluncurkan pada tahun 2018.

“Teknologi ini diaplikasikan untuk budidaya lahan gogo. Varietas unggul baru yang akan didemokan melalui teknologi ATABELA adalah Inpago 12 yang sudah teruji unggul ditanam setiap musim di lahan gogo Tajug Gede,” ucap Fajri.

Kegiatan kali ini diikuti oleh sekitar 200 petani milenial dari berbagai wilayah Kabupaten Purwakarta. Selain diberi pengarahan dan teori, para petani milenial juga langsung praktek melakukan penanaman padi gogo di lahan yang berada sekitar Tajug Gede Purwakarta. ● bia/es

Moreno Soeprapto: Tinjau Langsung Pemasangan PJUTS di Malang

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto serius mengawal berbagai program dan usulan yang akan dilaksanakan di Malang Raya. Salah satunya, pengawalan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang merupakan Program Kementerian ESDM Dirjen EBTKE di wilayah Kecamatan Blimbing kota Malang.

Pada kegiatan itu, Moreno juga menggelar dengar pendapat bersama masyarakat RW 4 Pandanwangi Blimbing sekaligus melakukan pemantauan di lokasi pemasangan PJUTS.

“PJU sangatlah penting karena akan sangat dibutuhkan masyarakat pengguna jalan saat malam hari. Akan

bahaya jika jalan atau daerah yang sering dilalui justru gelap karena kurang Penerangan Jalan Umum,” ungkap Moreno, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, jikalau PJU sudah ada bukan berarti tidak memunculkan persoalan seperti biaya listrik yang akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat sekitar.

“Dengan adanya pemasangan PJUTS tersebut, maka permasalahan biaya tidak perlu dipikirkan lagi karena sumber energi dari PJU yang dipasang oleh Dirjen EBTKE ini menggunakan tenaga matahari (*renewable energy*),” ungkap politisi dapil Malang Raya ini.

Sementara itu, perwakilan salah satu warga sekitar, Ahmad sangat mengapresiasi adanya pemasangan PJUTS di wilayah RW 4 Pandanwangi Blimbing dan sekitarnya.

“Adanya pemasangan PJUTS akan mampu memenuhi kebutuhan penerangan jalan di wilayah serta akan sangat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat apalagi semakin banyaknya pemukiman di wilayah ini yang secara otomatis juga akan menambah jumlah penduduk di sini,” paparnya. ● pun/es



Anggota DPR RI Moreno Soeprapto saat pemantauan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Foto: Ist/ni

Sri Wahyuni: Dorong Pelatihan Pengembangan BUMDes



Anggota DPR RI Sri Wahyuni usai kegiatan pelatihan pengembangan BUMDes. Foto: Ist/ivi

Anggota DPR RI Sri Wahyuni menggelar kegiatan serap aspirasi di Kabupaten Trenggalek. Acara tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) dengan kegiatan pelatihan kepada masyarakat.

Adapun kegiatan pelatihan tersebut bertajuk Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) angkatan XI yang berlangsung mulai 21-25 Juni 2021. Sri Wahyuni mengatakan, pihaknya bersama Kemendes PDTT RI memberikan pelatihan pengembangan kepada 40 BUMDes di Kabupaten Trenggalek.

Menurutnya kegiatan yang berlangsung di masa pandemi tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Tanggal 21- 22 Juni dilakukan secara online ,dan setelah dilakukan tes PCR kepada seluruh peserta kita lakukan pertemuan tatap muka," ucap Politisi dapil Jawa Timur VII itu.

Berbagai materi telah diberikan oleh Balai Besar Pelatihan dan

Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPP MDDT) Yogyakarta. "Seperti orientasi program, tata kelola, penggalian potensi, strategi pengembangan, bisnis plan, dan membangun jaringan telah diberikan oleh pemateri," ulas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Legislator Partai NasDem ini juga berharap BUMDes di Kabupaten Trenggalek bisa maju dan bisa mengikuti perkembangan jaman. "Dengan BUMDes yang maju secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa setempat. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan meningkat," pungkasnya. • ah/es



Anggota DPR RI Arzeti Bilbina meninjau program bantuan Jaring Pengaman Sosial Padat Karya di Desa Kemantren. Foto: Ist/mf

Arzeti Bilbina: Harap Program JPS Beri Suntikan Semangat di Tengah Pandemi

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina meninjau program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Padat Karya di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, awal Juni lalu.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan program bantuan ini berhasil terealisasi atas sinergi Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama Komisi IX DPR RI.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, bantuan ini merupakan program pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktifitas masyarakat yang menekankan upaya penyerapan tenaga kerja sebanyak mungkin di Indonesia, terutama mereka yang sudah tidak bekerja atau terdampak Covid 19.

“Semoga dengan terealisasinya program bantuan seperti ini, dapat

memberi suntikan semangat bagi kita semua di tengah pandemi untuk bisa berjuang bersama. Aamiin,” kata legislator dapil Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tersebut menutup pernyataannya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kemnaker melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Yang mana di antara program JPS tersebut adalah pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha dan Padat Karya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan. ●
sf/es

Zulfikar Hamonangan: Terima Aspirasi dan Masyarakat Selapajang

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Zulfikar Hamonangan menyambangi wilayah Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, beberapa waktu lalu.



Anggota DPR RI Zulfikar Hamonangan menerima banyak aspirasi dari masyarakat Tangerang. Foto: Ist/mtl

Pria yang akrab disapa Zul ini merespons secara positif semua aspirasi yang disampaikan masyarakat daerah pemilihannya yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam kunjungannya di Selapajang, ia menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan,

infrastruktur, hingga keluhan soal himpitan ekonomi. Selain itu, Zul juga menerima masukan lainnya, antara lain yaitu tentang persoalan sampah, sarana air bersih, dan persoalan penerangan jalan umum.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat itu menyatakan kesiapannya membantu warga terkait masalah penerangan jalan, bantuan penyediaan fasilitas motor sampah,

dan juga bantuan air bersih yang dibutuhkan masyarakat.

Semangatnya berbuat untuk masyarakat tak pernah surut. “Sebagai wakil rakyat saya selalu ikut turun bersama tim melakukan aksi nyata,” ucap Zul.

Ia akan memperjuangkan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat. Dikatakannya, Fraksi Demokrat DPR RI sangat berkomitmen untuk peduli kepada masyarakat.

“Sebab, ini merupakan instruksi langsung dari Ketum Umum DPP Partai Demokrat. Para wakil rakyat dari Partai Demokrat harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi. Kami diminta untuk tampil ke tengah masyarakat dengan cara membantu atau meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Zul acapkali menunjukkan sikap kepeduliannya kepada masyarakat dengan cara konkret. Ia mendistribusikan paket sembako kepada warga Selapajang yang kurang mampu.

**AGAR WARGA UNTUK
BERSABAR DENGAN
KONDISI SAAT INI
DAN TETAP DISIPLIN
MENERAPKAN
PROTOKOL
KESEHATAN SECARA
KETAT.**

Menyikapi pandemi Covid-19 yang begitu berdampak terhadap perekonomian masyarakat, Zul berpesan agar warga untuk bersabar dengan kondisi saat ini dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus berdoa agar wabah pandemi virus corona ini segera berakhir, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal. ● dep/es

Hermanto: Serahkan Gerobak Sampah pada Masyarakat Padang

Anggota DPR RI Hermanto dalam kunjungan kerjanya di dapil menyerahkan bantuan pemerintah berupa gerobak sampah dan tempat sampah tematik kepada sepuluh komunitas masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diserahkan di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Penyerahan gerobak dan tempat sampah ini diserahkan langsung oleh Hermanto mewakili Pemerintah Pusat kepada Kepala DLH Kota Padang Mairizon mewakili masyarakat Padang.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, wakil rakyat dapil Sumatera Barat I mengatakan bahwa negara bertanggung jawab dan wajib hadir bersama masyarakat dalam menangani permasalahan sampah.

“Setiap hari kita memproduksi sampah. Kalau sampah dibiarkan bisa menimbulkan berbagai penyakit.

Karena itu kita semua bertanggung jawab menangani sampah,” ujarnya saat mengisi sambutan pada kegiatan tersebut.

Ia menambahkan bahwa negara membantu masyarakat dengan pengadaan berbagai fasilitas penanganan sampah, diantaranya berupa gerobak sampah dan tempat sampah tematik.

Kepada penerima bantuan, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini meminta agar gerobak dan tempat sampah tersebut

PUASA MEMBERSIHKAN HATI, ZAKAT MEMBERSIHKAN HARTA, GEROBAK SAMPAH MEMBERSIHKAN LINGKUNGAN

dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar lingkungan senantiasa terjaga kebersihannya.

“Puasa membersihkan hati, zakat membersihkan harta, gerobak sampah membersihkan lingkungan,” tambah Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala DLH Kota Padang Mairizon menginformasikan bahwa produksi sampah di Kota Padang setiap harinya mencapai 600 ton.

Dalam pengelolaannya, Kota Padang kekurangan 59 buah container sampah, sehingga pengangkutan sampah setiap harinya dilakukan sebanyak 2 kali.

“Dengan bantuan gerobak sampah ini, maka sampah disalurkan ke bank sampah. Bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPS,” tutur Mairizon. ● bia/es



Anggota DPR RI Hermanto menyerahkan bantuan pemerintah kepada sepuluh komunitas masyarakat di Kota Padang. Foto: Ist/nvl

Muhammad Riza: Bantu Kelengkapan Sarana dan Prasarana Posyandu Curug

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan garda terdepan dalam melayani kebutuhan kesehatan bagi anak-anak dan ibu hamil. Keberadaannya sangat strategis untuk membantu menyehatkan kehidupan masyarakat. Adalah Muhammad Rizal, wakil rakyat yang peduli soal ini.

masyarakat selalu menunggu setiap kegiatan-kegiatan Posyandu,” ucap Rizal.

Menurut Rizal, Posyandu memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan tumbuh kembang anak dan balita di daerah-daerah. Untuk itu,

kader Posyandu yang bekerja tanpa pamrih harus didukung. Di Posyandu ini, Rizal memberi bantuan sarana dan prasarana yang diserahkan kepada kader dan pengurus Posyandu setempat, pertengahan Juni 2021 lalu.

Masih di lokasi yang sama, sebelumnya Rizal juga menyambangi sekretariat RW 001, Binong, Curug. Kali ini kepedulian Rizal ditunjukkan dengan memberi bantuan sarana listrik yang sangat dibutuhkan pengurus RW setempat. Di sini Rizal menyerap banyak aspirasi masyarakat konstituennya dengan mengumpulkan para ketua RT dan pengurus RW 001, tepatnya di Kampung Peusar, Binong, Kab. Tangerang.

“Kami memberikan dukungan dan bantuan pemasangan listrik di kantor sekretariat RW, agar kegiatan di lingkungan RW tersebut dapat berjalan dengan lancar,” harap mantan

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, MPR RI. Dengan telah memiliki akses listrik di kantor sekretariat RW, mobilitas pengurus RW kian mudah, baik siang maupun malam. Inilah kepedulian Rizal saat berada di tengah-tengah masyarakat. • mh/es



Anggota DPR RI Muhammad Rizal saat mengunjungi Posyandu Melati XXII, Kabupaten Tangerang. Foto: Ist/mt

Politisi PAN itu, mendatangi Posyandu Melati XXII, RW 008 di Kecamatan Curug, Kelurahan Binong, Kabupaten Tangerang. Ia ingin melihat dari dekat aktivitas

dan kebutuhan Posyandu di daerah pemilihannya (dapil) Banten III yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

“Kehadiran Posyandu sangat dibutuhkan di daerah-daerah. Terbukti,



Wartiah: Angka Stunting dan Kematian Ibu Melahirkan Harus Dikendalikan

Anggota DPR RI Wartiah menilai untuk menurunkan angka kasus stunting di Indonesia harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mengingat, status stunting Indonesia masih berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara.



Anggota DPR RI Wartiah saat mengunjungi Posyandu Siti Hajar. Foto: Ist/nvl

a mengatakan peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional yang jatuh setiap tanggal 29 Juni harus bisa mengingatkan kita tentang pentingnya harmonisasi dan pentingnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga memiliki peran besar dalam upaya memperkuat ketahanan nasional.

” Peringatan Harganas juga bisa menjadi momen bagi pemerintah untuk memastikan semua keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka,

sehingga bisa menurunkan angka stunting pada bayi,” ujar Wartiah, baru-baru ini.

Merujuk pada data survei status gizi yang dilakukan Kemenkes tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67 persen. Angka Kematian Ibu diharapkan turun menjadi 183 per 100.000 kelahiran pada tahun 2024.

Politisi dari F – PPP ini menambahkan setiap insan termasuk generasi muda yang belum menikah

bisa ikut menciptakan keluarga ideal dengan cara menghindari pernikahan dini.

“Semua orang tua, sekolah dan pemerintah juga harus memastikan berkurangnya angka pernikahan dini, sebab berpotensi melahirkan keluarga kurang sehat, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi,” jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, semua orang harus bisa membentuk turut mendukung program keluarga berencana, yaitu keluarga yang mampu merencanakan kelahiran dengan menjaga jarak kehamilan, merencanakan masa depan anak dan

MOMEN BAGI
PEMERINTAH UNTUK
MEMASTIKAN SEMUA
KELUARGA BISA
MEMENUHI KEBUTUHAN
GIZI MEREKA

lainnya. Karena, salah satu penyebab masih tingginya angka stunting termasuk di NTB adalah perkawinan usia dini dan anemia pada remaja.

“Keluarga berencana tidak hanya mampu mencegah meningkatnya populasi dengan tidak terkendali, namun juga menghadirkan keluarga sehat yang sejahtera,” tandas anggota DPR dapil NTB ini. • ann/es

Refi Mascot

Galeri Bau Tanah Gunakan Area Publik sebagai Ruang Berekspresi

Refi Mascot adalah seorang fotografer budaya yang menggagas penggunaan publik area untuk kegiatan pameran fotografi dan ruang berekspresi. Namanya memang tidak setenar fotografer profesional yang ada di Indonesia, namun kiprahnya dalam mencetuskan ide penggunaan area publik sebagai ruang berekspresi membuat sebahagian orang kagum padanya.

Di dinding luar Stasiun Kereta Api Cikini Jakarta, Komunitas Galeri Bau Tanah yang dipimpinnya menggelar pameran foto. Hal itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya Stasiun Cikini direnovasi dan Galeri Bau Tanah tidak bisa lagi menjadikannya sebagai ruang berekspresi.

“Dan ketika kondisi bangunan Stasiun direnovasi maka semuanya juga berubah. Pada era itu kita sangat kekurangan ruang berekspresi dan ruang bermain. Untuk mengiklankan diri juga susah. Fotografer yang mengenyam bangku sekolah saja susah untuk bisa menunjukkan karyanya apalagi mereka yang tidak ada *basic* sekolahnya atau yang tidak tergabung dalam satu klub fotografi dan berkawan dengan jaringan fotografer ternama,” tutur Refi.

Ia sebelumnya sempat berkeinginan untuk menjadi seorang pewarta foto. Namun ia mengurungkan niatnya karena merasa bahwa ia hanya bisa memotret dan belum fasih menulis sebuah berita. “Jadi salah satu jalan (untuk bisa menyalurkan hobi fotografi) adalah dengan mengambilalih ruang publik. Sebab kalau ruang publik tidak diambilalih maka sulit untuk mencari tempat berekspresi. Saya menyebutnya,

mengambilalih ruang publik secara terhormat, dengan mengadakan berbagai pameran dan berlanjut dengan adanya edukasi,” ucapnya.

Sementara sekarang kita sudah punya kolom galeri sendiri, baik melalui media sosial Instagram ataupun Facebook. Namun demikian yang lebih menarik tetaplah dengan cara tatap muka dibandingkan dengan dunia maya, lanjutnya.

“Saat ini kita semakin susah, meskipun pandemi Covid-19 selesai. Karena hak berekspresinya semakin sedikit. Mungkin secara kasat mata (hak berekspresi) kelihatannya luas, tetapi dengan adanya undang-undang ITE ternyata ikut berdampak luas kemana-mana dan terkadang menjadi penghambat kebebasan

Refi Mascot.
Foto: Ist



bereskspresi,” tandas pria berjanggut panjang itu.

Refi mengatakan, pameran fotografi yang dilakukan di ruang publik juga semakin tidak jelas karena seakan tidak memiliki ‘*soul*’ pada karya yang dipamerkan. “Mungkin kita bisa melakukan pameran dimana-mana, tetapi hasil karya fotografi itu seperti tidak ada jiwanya. Kalau dahulu tidak sekedar pameran, si fotografernya juga ikut hadir. Tetapi sekarang banyak pameran di ruang publik tetapi si fotografer tidak ada di titik itu. Sehingga tidak ada emosi. Banyak karya-karya istimewa dipajang di ruang publik tetapi *nothing*. Secara emosional kosong. Karena mereka hanya mengirim karya tanpa ikut terlibat secara emosional dalam pameran tersebut,” tukasnya.

Kalau di Galeri Bau Tanah, sambung Refi, mereka ikut memasang karya mereka sendiri hingga ada emosi yang terbangun didalamnya. Dikatakannya, Galeri Bau tanah menyediakan ruang bagi para seniman untuk mengekspresikan karyanya. “Bisa dikatakan, di Jakarta baru ada di situ. Bahkan ada kajian yang menyatakan bahwa itu adalah yang pertama di Asia Tenggara. Mungkin ada, namun sifatnya *by project* saja seperti festival, sementara Galeri Bau Tanah tetap *continue* melakukannya selama beberapa tahun,” papar lelaki berambut gondrong tersebut.

Selain motret dan menjadi penggagas galeri *public area*, Refi Mascot juga berprofesi sebagai pengumpul dan penjual barang unik lawas dan antic. Semua barang itu dipajang disuatu tempat yang disebut sebagai ‘Gudang Jimat’. Kegiatan menjual dan mengumpulkan barang unik dan antik itu dilakukannya untuk mendukung dan *men-support* perekonomian kegiatan pribadinya. Sudah 14 tahun Refi menggeluti dunia jual-beli barang-barang lawas. Sebelum Kawasan Jembatan Item di bilangan Jatinegara dikenal banyak orang, Refi sudah terlebih dahulu mempunya lapak di sana.

“*Basic*-nya saya suka cinematografi, khususnya di artistik. Sebelum motret saya memang di artistik. Barang-barang ini sering disewa atau dibeli untuk kepentingan shooting. Kalau di film kan kita terbiasa kerja bareng, sementara di fotografi kerja individual,” ungkap Refi.

Ia mengisahkan, pasar loak Jembatan Item merupakan pasar yang terjadi secara alami. Refi menyebut Jembatan Item sebagai Mata Air, maksudnya barang apapun ada disana. “Apapun yang dijual di sini laku kalau memang harganya cocok. Kalau dahulu orang takut untuk datang ke sini karena riwayatnya kurang bagus, sebagai tempat penodongan atau kriminal. Seiring dikenalnya nama Jembatan Item akhirnya *image* yang buruk itupun hilang. Pasar loak adalah perpustakaan semua ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Refi Mascot juga pernah membuat sebuah museum tattoo. Secara tempat saat ini museum tattoo yang dibuatnya sudah tidak lagi berjalan, namun secara *image* dan *online* masih tetap eksis. Kesenangan Refi terhadap tattoo didasari hobinya memotret budaya.

“Saya suka hutan dan parang. Kalau sedang ke pedalaman melihat tattoo dan parang adalah dua hal yang saya suka. Waktu motret di Mentawai, dengan kondisi yang ada di sana, terinspirasi untuk membuat tattoo museum. Tujuannya sebagai salah satu upaya untuk mengubah *image negative* tentang tattoo. Kalau negara tidak mengakui tattoo sebagai budaya Indonesia, maka sampai kapanpun juga tidak pernah ada pengakuan positif tentang tattoo,” ucap Refi.

Dikatakannya, tattoo Indonesia merupakan salah satu tattoo tertua yang ada didunia. Khususnya di Mentawai yang hingga sekarang masih bisa dilihat, dirasa, dan disentuh. Menurutnya, ada perbedaan antara tattoo Mentawai dan Kalimantan. Jenis tattoo Kalimantan dari segi motif lebih modern dibandingkan tattoo Mentawai. Hal itu terlihat dari gambar atau motif yang dibuat lebih nyata bentuknya, sementara di

Mentawai motifnya adalah garis-garis. Secara teknik cara membuat pada keduanya sama yakni dengan diketuk, dengan irama yang berbeda dan alat yang juga berbeda.

“Kalau sebelumnya, di Mentawai tattoo dibuat dengan cara diketuk menggunakan tulang atau duri, tetapi sekarang sudah menggunakan peniti dan jarum mengikuti perkembangan yang ada. Tahun 2008-an teknologi mulai masuk kesana. Banyak seniman tattoo yang datang kesana melakukan *sharing* informasi. Mereka terinspirasi dengan tehnik serta motif tattoo tribal atau tattoo adat,” paparnya.

Refi menyampaikan, bisa dikatakan hampir semua tattoo adat cenderung tidak memiliki banyak warna karena mengikuti warna dari bahan alami. Tattoo sendiri sudah ada sebelum fotografi. Sama halnya dengan fotografi tattoo juga merekam apa yang dilihat oleh masyarakat adat yang rata-rata hidupnya memang bersinggungan langsung dengan alam. Oleh karenanya tattoo yang ada di tubuhnya adalah gambaran alam sekitarnya, seperti flora dan juga fauna.

“Tattoo menjadi sebuah rekaman lingkungan dan mendekati sisi agama atau kepercayaan asli mereka. Ada tattoo adat dan ada juga tattoo budaya. Tatoo tribal merupakan tattoo dengan motif tattoo adat. Orang yang melakukan tattoo adat adalah mereka yang tergolong dalam satu prinsip, anak suku, melakukan kegiatan-kegiatan kesukuan seperti menuju kedewasaan, melakukan perjalanan, berburu, meramu, atau memiliki kecerdasan lainnya. Sedangkan pada tattoo budaya biasanya mereka adalah orang-orang yang di tattoo karena terinspirasi dari Motif-motif tattoo adat tanpa melalui proses ritual,” tambahnya.

Refi berprinsip, dalam hidup, harta terakhir adalah menjaga kenangan. “Lakukanlah segala sesuatunya secara total dan tetap konsisten berkelanjutan,” pesan Refi pada generasi muda Indonesia. ● dep/es

(sumber kanal Youtube Tirto Andayanto)



Pimpinan dan ANggota DPR RI didampingi Sekjen DPR foto bersama dengan peserta Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI.

Foto: Jaka/nvi

Forum komunikasi Sinergikan DPR dengan Wartawan

Forum Komunikasi dan Sosialisasi antara DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen DPR RI kembali dilaksanakan tahun 2021 ini. Tak hanya menjadi wadah yang mempererat silaturahmi dengan awak media, forum kali ini juga memperbincangkan peran DPR RI dalam mengupayakan pemulihan ekonomi di saat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa forum ini merupakan wadah dalam rangka silaturahmi antara pimpinan dan anggota dewan serta lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan para wartawan yang tergabung dalam koordinatoriat tersebut. “Jumlah

wartawan yang menghadiri acara ini sebanyak 92 orang yang terdiri dari berbagai macam media. Mulai dari media cetak, media siber maupun media siaran yakni radio atau televisi,” urainya.

Kegiatan dilaksanakan dalam waktu tiga hari, dimana pada hari pertama akan dibuka dengan *keynote speech* dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel

dan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan narasumber Anggota Komisi VI DPR RI ST. Ananta Wahana dan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago. Adapun tema yang diangkat dalam diskusi ini ialah “Peran DPR RI Dalam Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi”.

Indra mengapresiasi kegiatan Forum

Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI sebagai wadah silaturahmi. Dimana di dalam forum tersebut dipertemukan antara pimpinan DPR RI, Anggota DPR serta wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

"Tujuannya agar ada sinergisitas antara wakil rakyat dan wartawan parlemen. Juga silaturahmi antara pimpinan, anggota, serta lingkungan Setjen dan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat," ujar Indra. Tak hanya itu forum ini dapat pula menyokong peran DPR dalam mengupayakan pemulihan ekonomi saat pandemi yang menjadi tema besar acara tersebut.

"Diskusi ini akan memperluas pandangan terhadap peran DPR dalam pemulihan ekonomi di saat pandemi. Diharapkan wartawan dapat menyajikan informasi yang komprehensif," sebut Sekjen. Sebab wartawan juga telah mengetahui kinerja anggota dewan lewat kegiatan dan rapatnya yang dapat diliput.

Turut Hadir Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Plt. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Muhammad Djazuli.

PARLEMEN DAN PERS HARUS BEKERJASAMA LAWAN PANDEMI

Bertindak sebagai *keynote speaker*, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan bahwa saat pandemi Covid-19 ini kolaborasi berbagai pihak akan sangat dibutuhkan, salah satunya antara parlemen dan pers. kolaborasi dan sinergi itulah kunci untuk dapat keluar dari tantangan pandemi ini secara bersama-sama.

"Kita harus mencari solusi bersama dan bekerja sama. Semua harus bergandengan tangan. Pers dan parlemen harus bisa bekerja sama dan mencari solusi bersama agar pandemi Covid-19 bisa segera diatasi dan ekonomi bisa pulih kembali," ujarnya dihadapan para wartawan yang hadir dalam acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Tangerang,

Banten, Jumat (18/6/2021).

Pers juga dipersilakan untuk mengkritisi hal-hal yang patut dikritisi, karena pers Indonesia membawa semangat perjuangan, objektivitas dan profesionalisme. "Bila perlu, pers dan parlemen bisa berkolaborasi membangun sinergi untuk kritis bersama. Karena parlemen juga memiliki fungsi pengawasan. Kita sama-sama menjadi wakil publik," kata Gobel.

DENGAN FUNGSI KEDEWANAN, DPR BERPERAN PENTING PULIHKAN EKONOMI

Menjadi salah satu narasumber pada sesi diskusi, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menilai DPR RI berperan penting dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan tiga fungsi kedewanan, yaitu legislasi (legal

Bahkan, untuk mendukung penanganan pandemi tersebut, DPR telah menyetujui adanya pelebaran defisit anggaran hingga tahun 2022, semata untuk membantu kinerja pemerintah mengutamakan aspek kesehatan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan BUMN, koperasi dan UMKM, Komisi VI DPR RI telah berupaya agar BUMN optimal dalam pengadaan vaksinasi yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk distribusi di masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, Komisi VI juga telah menyetujui adanya bantuan riil bagi masyarakat dalam bentuk Program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro).

"Itu kita dorong agar itu bisa jalan. Meskipun kita dalam kondisi sekarang ini posisinya UMKM itu sudah remuk



Anggota DPR RI ST Ananta Wahana saat sesi diskusi. Foto: Jaka/mvl

drafting), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Tiga fungsi tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintah agar mengutamakan aspek kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi dapat mengikuti pada gilirannya.

Dalam hal legislasi, misalnya, DPR RI telah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

juga, itu awalnya yang Rp2,4 juta yang sekarang menjadi Rp1,2 juta itu pun akhirnya dipakai oleh para pelaku UMKM itu untuk menutupi kebutuhan hidupnya," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Dengan adanya dukungan DPR dalam pemulihan ekonomi yang riil di masyarakat tersebut, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2021 masih minus 0,74 persen, namun Ananta yakin Indonesia mampu pulih kembali dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 4 persen di akhir tahun. ● ah/es

WASPADA BAHAYA VARIAN DELTA



Ditulis oleh:
dr. Andi Marsa Nadhira (RS Universitas Indonesia)

Hampir satu setengah tahun pandemi berjalan, penelitian untuk pengobatan dan vaksinasi Covid-19 yang masih terus berlangsung mulai membuahkan hasil. Namun, para ahli mengingatkan untuk tetap waspada, karena ada varian baru virus SARS-CoV-2 yang bisa jadi musuh terbaru kita semua.

APA ITU MUTASI VIRUS?

Setelah virus masuk dan menginfeksi sebuah sel, virus akan melakukan proses replikasi, yaitu proses dimana virus memperbanyak dirinya. Semua virus, termasuk SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19, akan mengalami perubahan seiring replikasinya. Hal ini biasa disebut mutasi. Virus dengan jenis mutasi yang baru disebut sebagai "varian" dari versi virus aslinya.

BAGAIMANA VIRUS BISA BERMUTASI?

Saat virus bersirkulasi di sebuah populasi dan menyebabkan banyak kasus infeksi, kemungkinan virus tersebut untuk mengalami mutasi akan meningkat. Lokasi materi genetik yang mengalami mutasi akan menentukan perubahan sifat virus tersebut, misalnya perbedaan pada tingkat keparahan (misalnya menyebabkan penyakit yang lebih ringan atau lebih berat) dan kemampuan transmisi (misalnya menjadi lebih menular).

APA YANG DIMAKSUD VARIAN DELTA?

Delta adalah nama varian virus B.1.617.2, yang merupakan sebuah mutasi virus SARS-CoV-2. Varian ini pertama kali ditemukan di India bulan Desember silam. Hingga saat ini, infeksi varian Delta sudah dilaporkan di sekitar puluhan negara, termasuk Indonesia. Oleh World Health Organization (WHO) dan Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika, varian ini disebut sebagai “*variant of concern*” karena terdapat bukti bahwa varian ini lebih cepat menular dan menyebabkan penyakit yang lebih berat.

APAKAH INFEKSI VARIAN DELTA MEMILIKI GEJALA YANG BERBEDA?

Hingga saat ini, belum ada hasil penelitian terpublikasi mengenai perbedaan gejala infeksi varian Delta. Salah satu data awal dari studi yang terbaru yang melibatkan lebih dari 4 juta orang di dunia terkait varian Delta, gejala yang lebih dominan pada varian Delta adalah sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan hidung yang berair atau meler. Namun, data ini masih merupakan data awal dan gejala ini tidak spesifik, sehingga tidak dapat dijadikan patokan. Jika Anda ragu dengan gejala yang Anda alami, segera periksakan diri Anda. Walaupun merupakan varian berbeda, varian Delta masih bisa terdeteksi oleh tes swab *polymerase chain reaction* (PCR).

SEBERAPA BERBAHAYA VARIAN DELTA?

Saat ini penelitian masih berlanjut untuk mempelajari varian Delta ini. Para ahli mengatakan bahwa transmisi varian Delta jauh lebih tinggi, hingga 40-60 persen lebih infeksius dibanding varian Covid-19 yang asli, dan dianggap sebagai varian virus yang paling cepat menular dibanding mutasi virus SARS-

CoV-2 yang sudah diidentifikasi hingga saat ini. Studi lain juga menemukan bahwa varian Delta dapat meningkatkan risiko rawat inap hingga dua kali lipat.

APAKAH VAKSIN DAPAT MENCEGAH TERINFEKSI VARIAN DELTA?

Hingga saat ini, banyak vaksin yang sudah beredar di dunia menunjukkan kemampuan untuk melawan varian Delta. Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan individu yang sudah divaksinasi Moderna di Amerika, vaksin tersebut memproduksi antibodi yang mampu melawan berbagai varian SARS-CoV-2, termasuk Delta. Vaksin lainnya, seperti Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca, juga dinilai efektif dalam menurunkan risiko rawat inap karena varian Delta setelah dosis lengkap. Belum terdapat hasil studi yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac efektif melawan varian Delta, namun penelitian masih berlangsung.

BAGAIMANA CARA MENGHADAPI TERINFEKSI VARIAN DELTA?

Cara terbaik menghadapi varian Delta adalah dengan mencegah penularan infeksi, dengan memakai masker dengan benar, menghindari tempat ramai atau ruangan tertutup, memastikan ruangan memiliki ventilasi baik, serta mencuci tangan. Pastikan juga diri Anda mendapatkan dosis lengkap vaksin Covid-19 untuk melindungi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jangan menunda mendapatkan vaksin hanya karena kekhawatiran adanya varian baru, karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang bisa Anda dapatkan. Semakin banyak orang yang divaksin, angka infeksi diharapkan akan menurun, yang akhirnya akan mengurangi kemungkinan virus untuk bermutasi.

Ingatlah, kita hanya bisa terlindungi jika semua orang terlindungi. •





Indahnya Curug Ciburial Di Pinggir Ibu Kota

Bogor menyimpan banyak air terjun (curug) yang bisa dijadikan solusi untuk mengatasi kejenuhan dari rutinitas sehari-hari. Salah satu curug yang sayang untuk dilewatkan adalah Curug Ciburial yang hanya berjarak 60 kilometer dari Ibu Kota Jakarta.

Tidak ada transportasi umum yang bisa mengantarkan kamu sampai ke Curug Ciburial, sehingga harus menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Untuk sampai ke Curug

Ciburial, salah satu 'pintu masuk' adalah Sentul Selatan. Jalan ke arah Leuwi Hejo, lalu lanjutkan perjalanan ke Kampung Cibeureum, Desa Cibadak, Babakan Madang, Bogor.

Sesampainya di Desa Cibeureum, kamu akan melihat papan nama Curug Ciburial. Di sini kendaraan

bisa dititipkan dengan tarif relatif murah, lalu perjalanan diteruskan dengan jalan kaki. Jangan lupa mampir ke pos yang telah disediakan untuk membeli tiket masuk Curug Ciburial seharga Rp 20.000 per orang. Di samping itu, kamu juga bisa memanfaatkan jasa pemandu wisata yang sudah disiapkan oleh pengelola setempat.

Setelah membeli tiket, perjalanan dimulai dengan menyusuri rumah warga. Walau hanya butuh kurang lebih 1 jam dari pos tiket, namun perjalanan trekking ke Curug Ciburial membutuhkan energi yang

cukup dan kaki yang kuat untuk berpijak. Tak ada salahnya kamu membawa air minum secukupnya agar tidak dehidrasi.

Selama perjalanan kamu akan melewati jalan setapak dari tanah liat dan bebatuan yang terus menanjak dan berliku dengan pemandangan sawah dan hutan. Kemudian, kamu akan menemui tanjakan yang ekstrem.

Kondisi jalan akan semakin sulit dilalui saat musim hujan. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena medannya cukup licin. Peralatan *trekking pole* akan sangat membantu kamu saat melintasi jalan setapak ini.

Kelelahan akan terbayar saat kamu berada di ketinggian, karena disuguhi pemandangan lembah hijau yang indah dengan ciri khas pepohonan pakis yang menjulang tinggi. Udaranya pun sangat sejuk, karena sudah memasuki kawasan hutan lindung.

Dari bukit ini, kondisi jalurnya menurun dan sedikit curam, berimbang dengan tanjakan sebelumnya. Perjalanan pun mulai berubah dari sisi kanan berupa jurang, kemudian semak liar dan menjadi pohon kopi.

Suara deras air seolah jadi penanda bahwa Curug Ciburial sudah dekat. Perlahan namun pasti kamu akan menemui persimpangan. Ke kanan arah Curug Ciburial dan ke kiri arah ke Curug Hordeng dan Curug Kembar. Kamu juga bisa memilih ke arah Curug Hordeng dan Curug Kembar terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Curug Ciburial tanpa harus berputar arah.

Ketiga curug ini berdekatan karena memiliki aliran yang sama, tetapi masing-masing menawarkan pemandangan ciamik. Jika memilih jalur kiri, maka untuk sampai ke Curug Ciburial, harus melewati Curug

Hordeng dan menyeberangi jeram kecil Curug Kembar yang membentuk seperti sungai.

Perjalanan selama satu jam terasa tidak sia-sia. Rasa lelah akan terbayar ketika sampai di Curug Ciburial. Alamnya begitu asri dan menyejukkan, banyak pepohonan dan tanaman yang tumbuh liar di tepi aliran curug.

Keindahan Curug Ciburial terletak pada susunan bebatuannya dan jumlah air

Kamu bisa berenang dan rasakan sensasi air kolam yang jernih, bahkan sesekali tampak bewarna hijau kebiruan. Berpadu indah dengan warna cokelat bebatuan disekitarnya.

Namun harus ingat, arusnya cukup deras, sehingga kamu perlu berpegangan pada tambang yang telah diikat pada batu besar. Untuk yang tidak bisa berenang, jangan khawatir, karena bisa bermain air di bawah air terjun



Pemandangan salah satu destinasi wisata di Bogor yaitu Curug Ciburial. Foto: idw/nvl

terjunnya. Dalam satu tempat, kamu dapat menikmati dua air terjun sekaligus. Curug yang kanan berasal dari mata air, jadi bisa diminum langsung.

Sementara aliran air lainnya mengalir dengan deras, membelah batuan besar di kedua sisinya dan membentuk kolam alami dengan kedalaman lebih kurang 6 meter.

dan merasakan kesegaran aliran dari mata air.

Bagi kamu yang suka bermeditasi, spot ini juga merupakan pilihan yang tepat sebab sepi pengunjung. Suara angin, gemericik air, dan hijaunya pepohonan bakal mengalirkan udara sejuk yang mendamaikan hati dan pikiran. ●ann/es

Azikin Solthan: Usir Jenuh dengan Bernyanyi

Penat dan jenuh akibat kesibukan kerja juga bisa timbul dalam diri para Anggota DPR RI. Terkadang hal seperti ini dapat menjadikan beban sehingga menghasilkan output yang kurang baik bagi konstituen dan diri sendiri tentunya. Untuk kembali fresh dan menyegarkan otak, sangat perlu melakukan refreasing menyalurkan ekspresi yang sempat terpendam.

Menyanyi bersama teman-teman, dipilih oleh Azikin Solthan untuk mengusir kejenuhannya. Bagi Azikin, menyanyi tidak hanya mengeluarkan suara begitu saja, namun kita perlu menghayati bait setiap bait kalimat kemudian mengikuti alunan musik.

“Dalam menyanyi kita perlu memperhatikan juga nada rendah dan tinggi nya agar teratur, berusaha menyanyi dengan baik namun bagi yang merasa suaranya kurang bagus tidak mengapa kok kalau tetap bernyanyi, bernyanyi lah semampunya,” ujarnya kepada **Parlementaria**.

Anggota Komisi IV DPR RI ini memiliki studio karaoke sendiri di rumahnya. Di tempat itulah Azikin biasa mengundang teman-teamnnya untuk menghibur diri bersama. Kebersamaan dalam satu hobi tersebut sangat terbayar dengan terhapusnya kejenuhan.

“Dengan menyanyi kita juga mendapatkan manfaat, yaitu berfungsi untuk psikologis. Dengan menyanyi bisa memicu *mood* menjadi positif, membuat

bahagia, dan baik untuk jiwa,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, bernyanyi juga dapat memperbaiki pernafasan bagi orang yang mengalami gangguan paru-paru dan membantu penderita demensia mengatasi penyakitnya.

“Bernyanyi membuat kita menarik nafas dalam, yang kemudian meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh dan membantu peningkatan pengaruh endorphin, hal ini sama seperti lonjakan endorphin ketika tertawa atau makan coklat. Sungguh unik bukan padahal hanya dengan menyanyi saja bisa berpengaruh sebegitu besar,” pungkasnya. • es

Anggota DPR RI
Azikin Solthan.
Foto: Ariel/rml



Menteri Jangan Males Bales Chat WA

“Online tapi kok males bales chat!... Oh mungkin bukan prioritas, atau dianggap gak penting. Emm... mudah-mudahan enggak gitu lah ya”



Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto: Oj/riwi

Saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahliil

Lahadalia akhir Mei lalu, ramai-ramai Anggota Komisi VI menyidur dengan nada satir karena pesan yang dikirimkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI kepada Menteri Bahliil melalui aplikasi WhatsApp (chat WA-nya) tidak kunjung dibalas. Padahal sebelum dilantik menjadi menteri, menurut Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bahliil ‘gercep’ (gerak cepat) untuk membalas WA.

“Tapi saya mau protes nih, semenjak jadi menteri susah sekali *dihubungin*, sebelum jadi menteri tiap kali WA baru



Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahliil Lahadalia. Foto: Oj/riwi

terkirim, *udah* ada balasan. Begitu jadi menteri, pontang panting kita nunggu balasan,” sindir Deddy dengan nada candaan.

Meskipun begitu, sebelum dia menyindir dengan kelakarnya, Deddy tak lupa mengucapkan selamat atas pelantikan Bahliil, menjadi Menteri Investasi. Setelah Deddy melontarkan sindirnya dengan candaan, seketika Anggota Komisi VI lainnya, Darmadi Durianto mengatakan, “Kalau itu saya setuju, kalau di-WA lama balasnya.”

Membalas komentar Darmadi, Deddy menambahkan, “sebelum jadi menteri *gak* gitu pak. Baru *sampe* Truno Joyo *udah* ada *balesan*. Jadi mudah mudahan komunikasi, kita jadi lebih enak Pak Menteri,” imbuh Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Disindir seperti itu, bahliil pun terlihat tergelak dan memahami dengan kondisi candaan sebagai salah satu cara untuk mencairkan suasana di ruang rapat. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal, yang saat itu memimpin rapat mengatakan, “nanti itu *dikasih* tanggapan khusus,” ujarnya.

Tak jarang Anggota DPR sering menyampaikan aspirasi langsung kepada para menteri. Tujuannya agar menteri bisa langsung memberikan tanggapan, atau bahkan tindakan langsung atas aduan yang disampaikan kepada oleh para wakil rakyat. Maka komunikasi melalui pesan aplikasi dinilai efektif mengadukan masalah yang ditemukan Anggota DPR di lapangan.

● eko/es



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
SIDANG KORNBANG



M. AZIS SYAMUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI
SIDANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
SIDANG KOREKUU



A. MUHAIMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
SIDANG KORKESRA

SEGENAP PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

mengucapkan :

Selamat Hari Raya

Idul Adha

10 Dzulhijjah 1442 H

